Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Otonomi Daerah Terhadap PDB Sektor Pertanian Indonesia (Periode 1986-2003)

SKRIPSI

Oleh :

Nama	:	**Eko Budi Santoso**
Nomor Mahasiswa	:	**02313153**
Program Studi	:	**Ekonomi Pembangunan**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI

YOGYAKARTA

2006

Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga kerja dan Otonomi Daerah Terhadap PDB Sektor Pertanian Indonesia (Periode 1986-2003)

SKRIPSI

disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang srata 1
Program Studi Ekonomi Pembangunan,
pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama	:	**Eko Budi Santoso**
Nomor Mahasiswa	:	**02313153**
Program Studi	:	**Ekonomi Pembangunan**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

" Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain seperti dimaksud dalam buku pedoman penyusunan skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan FE UII. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa peryataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 16 Maret 2006

Penulis,

Eko Budi santoso

PENGESAHAN

Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga kerja dan Otonomi Daerah Terhadap PDB Sektor Pertanian Indonesia (Periode 1986-2003)

Nama : Eko Budi Santoso
Nomor Mahasiswa : 02313153
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 16 Maret 2006
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen pembimbing,

Dra. Indah Susantun, M.Si

Kata Pengantar

Bismillaahirrahmaanirrahiim....

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah AWT, yang telah melimpahkan segala rahmat hidayah dan karuniaNya serta kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul " ***Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga kerja dan Otonomi Daerah Terhadap PDB Sektor Pertanian Indonesia Periode 1986-2003 ".*** Skripsi ini secara garis besar memuat tentang pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada sektor pertanian, Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor pertanian dan jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Unversitas Islam Indonesia.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu tiada yang pantas penulis haturkan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dra. Indah Susantun, Msi, Selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak mengarahkan serta memberikan masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Suwarsono, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Kata Pengantar	v
Halaman Daftar Isi	vii
Halaman Daftar Tabel	xii
Halaman Daftar Gambar	xii
Halaman Daftar Lampiran	xiv
Halaman Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematikan Penulisan	9

BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN 11

2.1. Ciri Umum Pertanian Indonesia 11

2.2. Pembagian Bidang-bidang Pertanian di Indonesia..... 19

2.2.1. Pertanian Rakyat..... 19

2.2.2. Perkebunan..... 20

2.2.3. Kehutanan..... 20

2.2.4. Peternakan..... 21

2.2.4.1. Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan tradisional..... 21

2.2.4.2.Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan semi Komersial..... 22

2.2.4.3. Peternak komersial..... 22

2.2.5. Perikanan..... 22

2.3. Kebijakan Pertanian di Indonesia..... 23

2.3.1. Kebijakan Harga..... 26

2.3.2. Kebijakan Pemasaran..... 28

2.3.3. Kebijakan Struktural..... 30

2.4. Investasi Pada Sektor Pertanian di Indonesia..... 31

2.4.1. Perkembangan investasi di Indonesia..... 32

2.5. Perkembangan Ketenagakerjaan Sektor Pertanian di Indonesia..... 36

2.5.1. Produktivitas Tenaga kerja Sektor Pertanian..... 39

2.6. Keterkaitan Kebijakan Otonomi daerah dan pertanian
di Indonesia..... 41

BAB III KAJIAN PUSTAKA 44

BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 48

4.1. Arti Penting Sektor Pertanian Bagi Perekonomian Indonesia.... 48

4.2. Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang..... 51

4.3. Investasi dan Penentuan tingkat Upah..... 55

4.4. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja 57

4.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja..... 58

4.6. Teori-teori Pertumbuhan..... 59

4.6.1. Teori Klasik..... 59

4.6.2.Teori Neo Klasik (Solow-Swan)..... 61

4.6.3. Teori Harrod-Domar..... 62

4.6.4. Teori Schumpeter..... 64

4.7. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)..... 65

4.7.1. Kebijakan Pemerintah dibidang Investasi..... 66

4.8. Penanaman Modal Asing (PMA)..... 68

4.9. Tenaga Kerja..... 68

4.10. Otonomi Daerah 69

4.11. Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen.... 70

4.11.1. Hubungan antara PMDN terhadap PDB Sektor Pertanian... 70

4.11.2. Hubungan antara PMA terhadap PDB Sektor Pertanian... 70

4.11.3. Hubungan antara Tenaga kerja terhadap PDB Sektor Pertanian..... 70

4.11.3. Hubungan antara Kebijakan Otonomi daerah terhadap PDB Sektor Pertanian..... 71

4.12. Hipotesis..... 72

BAB V METODE PENELITIAN 73

5.1. Metode Penelitian 73

5.1.1. Jenis dan Sumber Data 73

5.1.2. Definisi Variabel 73

5.2. Metode Analisa Data 75

5.2.1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil 75

5.2.2. Pemilihan Model Regresi 76

5.2.3. Uji Statistik 77

5.2.4. Pengujian Asumsi Klasik 79

BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN 83

6.1. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis 83

6.1.1. Pemilihan Model regresi 83

6.1.2. Hasil Regresi 86

6.1.3. Koefisien Determinasi (R^2) 87

6.1.4. Pengujian t- Statistik 87

6.1.5. Pengujian F Statistik 91

6.2. Pengujian Asumsi Klasik 92

6.2.1. Multikolinieritas 92

6.2.3. Autokorelasi 93

6.2.4. Heteroskedstisitas 94

6.3. Interpretasi Ekonomi 95

6.4. Pembahasan Hasil Analisis..... 96

BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI 98

7.1. Simpulan 98

7.2. Implikasi 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Data Penduduk Berumur 15 tahun ke atas yang bekerja Menurut lapangan usaha utama	2
1.2. Kontribusi Sub sektor Pertanian Terhadap PDB sektor Pertanian...	4
1.3. kontribusi sektor pertanian terhadap PDB atas dasar harga Konstan 1993.....	5
2.1. Intensitas Penggunaan Traktor di beberapa Negara Asia.....	15
2.2. Lahan Irigasi di beberapa Negara Asia	16
2.3. Lahan Pertanian di beberapa Negara Asia.....	18
2.4. Perkembangan Persetujuan Proyek	34
2.5. Output dan Produktivitas di Sektor Pertanian 1979-2000	40
5.1. Uji Statistik Durbin-Watson	80
6.1. Hasil Uji Statistik	88
6.2. Hasil Pengujian Multikolinieritas	92
6.3. Hasil Uji Glejser	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Perkembangan Persetujuan Nilai Investasi 1991-2002	35
2.2. Perbandingan Nilai Investasi Sektor Pertanian Terhadap Total Investasi Yang disetujui	35
4.1. Kurva Fungsi Produksi Neo Klasik	62
4.2. Kurva Fungsi Produksi Harrod-domar	63
5.1. Statistik Durbin-Watson d	80
6.1. Uji Statistik Durbin-Watson.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

I. Data Perkembangan PDB sektor Pertanian, PMDN Sektor Pertanian, PMA Sektor Pertanian dan Jumlah Tenaga Kerja sektor Pertanian di Indonesia serta dumy Variabel Kebijakan Otonomi Daerah

II. Hasil Regresi Linier

III. Hasil Regresi Log Linier

IV. Hasil Regresi Linier yang Telah Disembuhkan dari Penyakit Autokorelasi

V. Hasil Uji MWD dengan Model Linier

VI. Hasil Uji MWD dengan Log Linier

VII. Hasil Uji Lm untuk Mendeteksi Autokorelasi

VIII. Hasil Uji Glejser untuk Mendeteksi Heterokedastisitas

IX. Correlation Matrix untuk mendeteksi Multikolinieritas

Abstraksi

Sektor pertanian ternyata mampu bertahan pada masa krisis, namun demikian dalam perkembangannya menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kontribusi relatif sektor pertanian terhadap PDB pada masa sebelum krisis. Keadaan ini merupakan salah satu ciri transformasi srtuktural yang telah terjadi pada perekonomian Indonesia di mana peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya pada PDB serta penyerapan tenaga kerja semakin menurun. Investasi yang ditanamkan pada sektor pertanian diharapkan mampu mendorong kenaikan output dan permintaan input sehingga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa investasi secara umum berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB dalam periode 1986-2003.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah ternyata berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan sektor pertanian. Koefisien tenaga kerja tidak berdampak signifikan bahkan negatif terhadap PDB sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja sangat rendah, sehingga penambahan jumlah tenaga kerja tidak berdampak pada peningkatan produksi. Hal ini sejalan pula dengan tingkat efisiensi (*return on scale*) menurun. Ini berarti pula bahwa penambahan output di sektor pertanian hanya dilakukan dengan cara memasukkan faktor teknologi dan mengurangi pekerja.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam pembangunan nasional sektor pertanian merupakan sektor yang sangat potensial dan mampu memberi kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia. Pentingnya sektor pertanian di dalam perekonomian tidak hanya diukur dari kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) atau pendapatan nasional, kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber pendapatan devisa Negara, tetapi potensinya juga harus dilihat sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan output dan diversifikasi produksi di sektor-sektor ekonomi lainnya.

Secara keseluruhan struktur kesempatan kerja di Indonesia terdiri dari berbagai sektor kegiatan ekonomi. Alokasi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia berasal dari sektor pertanian, yang diikuti dengan sektor perdagangan dan jasa. Angkatan kerja yang bekerja menurut sektor pertanian dapat dilihat pada tabel 1.1. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dari tahun ke tahun masih memberikan kontribusi paling tinggi yaitu pada tahun 1997 mencapai 41,1 % dari total tenaga kerja di Indonesia. Akibat krisis ekonomi penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian meningkat menjadi 44,98 % pada tahun 1998 dan 44,27 % pada tahun 2002. Selama periode 1997 - 2002 penyerapan tenaga kerja sektor pertanian meningkat menjadi 3,17 %. Oleh karena sektor pertanian banyak berada di pedesaan maka diduga terjadi pergerakan atau mobilitas tenga kerja dari kota ke pedesaan. Tabel

1.1 menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap menjadi katup utama penyerap tenaga kerja. Setidaknya 2,38 juta orang yang menganggur akibat pemutusan hubungan kerja dari sektor lain (terutama sektor industri) mengalir masuk ke sektor pertanian. (Laporan PATANAS, 2002).

Tabel 1.1

Penduduk Berumur 15 tahun ke Atas yang Bekerja Menurut lapangan usaha utama 1996-2003

Lapangan Pekerjaan Utama	1996	1997	1998	2000	2001	2002	2003
1	37.720.251	35.848.631	39.414.765	40.676.713	39.743.908	40.633.271	42.001.437
2	10.773.038	11.214.822	9.933.622	11.641.757	12.086.122	12.109.997	10.927.342
3	3.796.228	4.200.200	3.521.682	3.497.232	3.837.554	4.273.914	4.106.597
4	16.102.552	17.221.184	16.814.233	18.489.005	17.469.129	17.795.386	16.845.995
5	3.941.799	4.137.653	4.153.707	4.553.855	4.448.279	4.672.584	4.976.928
6	689.733	656.724	617.722	882.600	1.127.823	991.745	1.294.832
7	11.738.859	12.640.694	12.394.272	9.574.009	11.003.482	10.360.188	9.746.381
0	939.353	1.129.848	822.446	522.560	1.091.120	810.081	885.405
Jumlah	85.701.813	87.049.756	87.672.449	89.837.731	90.807.417	91.647.166	90.784.917

Keterangan :

1 = Pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan

2 = Industri pengolahan

3 = Bangunan

4 = Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel

5 = Angkutan, pergudangan, komunikasi

6 = Keuangan, asuransi, jasa perusahaan, sewa bangunan dan tanah

7 = Jasa kemasyarakatan

0 = lainnya (pertambangan, listrik, gas, dan air)

Selama krisis ekonomi dan moneter melanda Indonesia yang ditandai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi minus 13,06 % pada akhir 1998 (BPS,2004), sektor pertanian khususnya agrobisnis sangat diharapkan menjadi penyelamat perekonomian nasional. Selain sebagai sektor yang mampu bertahan dalam masa krisis, sektor pertanian juga mampu memberikan kontribusi sebesar 16,91 % terhadap PDB nasional pada akhir tahun 1998. Kontribusi ini meningkat 2,03 % dari tahun sebelumnya (1997) yaitu sebesar 14,88 %.

Dalam pemberian kontribusinya terhadap PDB nasional. PDB sektor pertanian terbagi dalam beberapa subsektor pertanian (Tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan dan hasil-hasilnya, kehutanan dan perikanan). Kontribusi dari sub sektor pertanian masih didominasi oleh sub sektor tanaman bahan makanan. Di banding dengan sub sektor lain sub sektor tanaman bahan makanan masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB sektor pertanian. Kontribusi Sub sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian atas harga konstan 1993 tahun 1996 - 2003 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Kontribusi Sub Sektor Pertanian Terhadap PDB Sektor Pertanian

Atas Harga Konstan 1993

Sub Sektor Pertanian	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1.	33647,0	32688,4	33350,4	34012,4	34533,8	34260,2	34533,6	35070,1
2.	10354,9	10496,6	10501,8	10702,0	10722,0	11331,9	11807,6	12417,3
3.	7483,1	7483,1	6439,7	6836,9	7061,3	7312,7	7485,2	7745,2
4.	6444,1	7189,8	6580,7	6288,1	6388,9	6556,2	6682,2	6658,9
5.	6248,5	6610,1	6736,9	7145,8	7502,9	7857,5	8160,9	8482,9
Jumlah	63827,8	64468,0	63609,5	64985,3	66208,9	67318,5	68669,7	70374,5

Keterangan :

1. Tanaman Bahan Makanan
2. Tanaman Perkebunan
3. Peternakan dan hasil-hasilnya
4. Kehutanan
5. Perikanan

Namun berbeda halnya dengan era otonomi daerah, setelah adanya kebijakan otonomi daerah, terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB). Penurunan kontribusi itu turun dari 17,24 % pada tahun 1999 menjadi 16,63 % pada tahun 2000 atau turun sebesar 0,61 %. Kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto (PDB) atas harga konstan 1993 tahun 1994-2002 dapat dilihat pada Tabel 1.3..

Tabel 1.3

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB atas harga konstan 1993

Tahun	PDB Sektor Pertanian (Rp Milyar)	PDB Nasional (Rp Milyar)	Kontribusi (%)
1994	59291.2	354640.80	16.72
1995	61885.2	383792.33	16.12
1996	63827,8	413797.92	15.42
1997	64468.0	433245.88	14.88
1998	63609.5	376051.57	16.91
1999	64985.3	376902.50	17.24
2000	66208.9	398016.8	16.63
2001	67318.5	411753.5	16.34
2002	68669.7	426942.9	16.08
Rata-rata	64648.67	397238.24	16.31

Meskipun sektor pertanian mampu bertahan pada masa krisis (tahun 1998 dan 1999), namun Tabel 1.3 juga menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kontribusi relatif sektor pertanian terhadap PDB pada masa sebelum krisis. Keadaan ini menurut Soekartawi (1995), merupakan salah satu ciri transformasi struktural yang telah terjadi pada perekonomian Indonesia di mana peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya pada PDB serta penyerapan tenaga kerja semakin menurun.

Dalam dinamika globalisasi dan perdagangan bebas agar sektor pertanian mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian, diperlukan suatu perencanaan nasional dengan pemilihan atas dasar prioritas dan sasaran dari program pembangunan pertanian. Salah satu aspek yang cukup menentukan keberhasilan pembangunan adalah penyebaran investasi yang sesuai dengan lokasi dan kondisi masyarakat. Adanya Investasi yang ditanamkan pada sektor pertanian diharapkan mampu mendorong kenaikan output dan permintaan input sehingga berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemulihan ekonomi.

Adanya pergeseran struktur ekonomi dari dominan pertanian menjadi dominan industri pada masa orde baru yang disebabkan oleh proses tranformasi struktural pada perekonomian Indonesia telah mengubah prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan ekonomi nasional yang sebelumnya lebih dititikberatkan pada sektor pertanian, mulai dikurangi, sedangkan peranan sektor-sektor pertanian khususunya industri dan jasa semakin ditingkatkan. Proses transformasi ini dilakukan dengan tergesa-gesa, sehingga ada tahapan yang terlewati dan berpengaruh negatif pada kondisi perekonomian nasional.

Resiko dan ketidakpastian serta struktur kepemilikan asset yang kurang menguntungkan terutama akibat tingginya suku bunga pinjaman, juga berpengaruh negatif terhadap investasi di sektor pertanian, sehingga nilai investasi di sektor pertanian masih sangat rendah dibandingkan sektor lainnya. Nilai investasi di Indonesia tahun 1999 untuk PMDN mencapai Rp 53,6 triliun dengan jumlah proyek 237 buah dan untuk PMA tercatat sebanyak 1.164 proyek dengan

nilai Rp 10,9 triliun. Selain itu, sektor industri yang berkembang dengan teknologi modern dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk memproduksi barang dan jasa ternyata tidak disertai dengan perluasan lapangan kerja produktif secara memadai sesuai dengan jumlah tenaga kerja tersedia. Atas dasar itu, tulisan ini akan menganalisis "**Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Otonomi Daerah Terhadap Sektor Pertanian**".

1.2. Perumusan Masalah

Pokok Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), PMA (Penanaman Modal Asing), tenaga kerja, kebijakan otonomi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDB sektor pertanian Indonesia ?
2. Apakah PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) berpengaruh terhadap PDB sektor pertanian Indonesia ?
3. Apakah PMA (Penanaman Modal Asing) berpengaruh terhadap PDB sektor pertanian Indonesia ?
4. Apakah tenaga kerja berpengaruh terhadap PDB sektor pertanian Indonesia ?
5. Apakah kebijakan otonomi daerah berpengaruh terhadap PDB sektor pertanian Indonesia ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh PMA (Penanaman Modal Asing) terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.
4. Menganalisis pengaruh kebijakan otonomi daerah terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperolah selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, selain itu penulis dapat membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian merupakan syarat yang wajib bagi penulis dalam menyelesaikan studi, maka penulis mengadakan penelitian ini dan hasilnya diharapkan mampu memberikan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan ekonomi, dengan demikian diharapkan dapat menentukan kebijakan dengan tepat.

3. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa atau pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. Di samping itu, guna meningkatkan, memperluas dan memantapkan wawasan dan keterampilan yang membentuk mental mahasiswa sebagai bekal memasuki lapangan kerja.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II. TINJAUAN UMUM SUBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat uraian atau gambaran umum atas subyek penelitian yang diambil dengan merujuk pada fakta yang bersumber pada data yang besifat umum sebagai gambaran secara makro yang berkaitan dengan penelitian.

BAB III. KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama.

BAB IV. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi dua bagian: *pertama,* mengenai teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan ditliti. Landasan teori ini berisi tori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori-teori yang didapat akan menjadi landasan bagi penulisan untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan mengenai judul yang penulis pilih. *Kedua,* hipotesis merupakan pernyataan yang menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

BAB V. METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan penjelasan satu pembahasan mengenai metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB VI. ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian dan analisa statistik.

BAB VII. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini akan menjelaska kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan implikasi yang muncul dari hasil simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat ditarik benang merah apa implikasi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

2.1. Ciri Umum Pertanian Indonesia

Pertanian Indonesia adalah pertanian tropika, karena sebagian daerahnya berada di daerah tropis yang langsung dipengaruhi oleh garis khatulistiwa yang memotong Indonesia hampir menjadi dua. Di samping pengaruh khatulistiwa, ada dua faktor alam lain yang ikut memberi corak pertanian Indonesia. Pertama, bentuknya sebagai kepulauan dan kedua, topografinya yang bergunung-gunung. Dalam hubungan ini letaknya yang berada di antara dua lautan besar yaitu Lautan Indonesia dan Lautan Pasifik, serta dua benua besar yaitu Australia dan Asia, juga ikut mempengaruhi iklim Indonesia terutama dalam perubahan arah angin dari daerah tekanan tinggi ke daerah tekanan rendah. Bentuk tanah yang bergunung-gunung memungkinkan adanya variasi suhu udara yang berbeda-beda pada suatu daerah tertentu.

Pada daerah pegunungan yang makin tinggi, pengaruh iklim tropik makin berkurang dan digantikan oleh semacam iklim sub-tropik (setengah panas) dan iklim setengah dingin. Secara oceanografi perairan laut di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kedua lautan dan benua tersebut. Perairan di darat sangat ditentukan oleh sungai, danau, dan rawa-rawa. Jenis usaha pemeliharaan ikan di kolam, waduk, sawah dan tambak sangat bergantung pada persediaan air dan juga bentuk pantai yang landai. Daerah perikanan laut yang penting antara lain Selat Andalas, Kepulauan Riau, Bangka Lautan Indonesia dari sebelah Barat Sumatra sampai pantai Selatan pulau Jawa, Selat Makasar, Laut Jawa Pantai Kalimantan

Barat, laut Arafuru, dan sebagainya. Daerah perikanan darat yaitu di danau, sungai rawa-rawa, tambak, kolam dan sawah. Luas permukaan berfluktuasi sepanjang tahun, bergantung pada banyaknya curah hujan. Perikanan merupakan mata pencaharian pokok para nelayan. Penangkapan masih dilakukan dengan cara-cara tradisional karena pengetahuan dan modal yang sangat terbatas. Walaupun pada kenyataannya tanaman-tanaman pertanian iklim sub-tropik dan tanaman iklim sedang seperti teh, kopi kina, sayur-sayuran dan buah-buahan menjadi tanaman perdagangan penting di Indonesia, namun hasil pertanian Indonesia yang penting adalah tanaman iklim panas seperti padi, jagung, tembakau, tebu, karet, dan kopra. Sebagai daerah kepulauan yang beriklim panas, Indonesia mempunyai curah hujan yang tinggi. Angka tertinggi tercatat di Padang (3.846 mm), Muaratewe Kalimantan Tengah (3.588 mm) dan Ambon (3.197 mm). Di daerah yang bercurah hujan tinggi, hutannya sangat lebat (hutan - hutan tropik).

Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki areal hutan yang terluas. Dari seluruh tanah Indonesia ± 63% di antaranya ditutupi oleh hutan. Perkembangan jenis ternak di Indonesia, juga dipengaruhi oleh curah hujan dan kesuburan tanah serta dua faktor tambahan yakni kelembaban dan suhu udara. Daerah-daerah Sumatra, Kalimantan, dan Irian jaya termasuk daerah basah yang ditandai oleh adanya rawa-rawa, hutan lebat serta hanya mempunyai sedikit persediaan hijauan makanan ternak (rumput-rumputan) yang tidak diusahakan oleh manusia. Hutan menambah kelembaban dan memperendah suhu iklim. Pada daerah dengan curah hujan sedang dan rendah, ditandai oleh adanya hutan yang tidak lebat dan padang sabana. Indonesia bagian Timur (makin ke Timur makin

kering) adalah daerah sabana yang mempunyai cukup persediaan hijauan makanan ternak sehingga sangat cocok untuk kehidupan ternak terutama sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba. Pulau jawa yang tidak dilewati oleh garis khatulistiwa mempunyai dua musim yang sangat berbeda setiap tahunnya yaitu hujan pada musim yang sangat berbeda setiap tahunnya yaitu hujan pada bulan November sampai April dengan curah hujan rata-rata 1.379 mm dan musim kemarau pada bulan Mei sampai Oktober dengan curah hujan hanya 575 mm. kenyataan adanya dua musim ini memberi ciri khas pada sifat pertanian di jawa. Padi, tanaman bahan makanan utama di Jawa (dan Indonesia pada umumnya) yang membutuhkan banyak air untuk pertumbuhannya, sebagian besar (kurang lebih 60 %) ditanam pada permulaan musim hujan yaitu pada bulan April-Juni. Itulah sebabnya pada bulan-bulan panen padi besar (panen raya) harga padi paling rendah. Sebaliknya bulan-bulan Januari sampai dengan Maret, dikenal di Jawa sebagai musim kekurangan persediaan pangan. (Mubyarto,1995).

Di daerah-daerah yang sangat kekurangan air dan kurang subur seperti Gunung Kidul di Yogyakarta atau Wonogiri di Surakarta, cara dan saat bertanam sangat erat hubungannya dengan musim. Di daerah-daerah ini digunakan sistem pertanian yang dikenal dengan nama " tumpang sari". Beberapa macam tanaman, ditanam pada tanah yang sama dengan waktu yang bersamaan (Oktober-November) tetapi karena perbedaan umur tanaman, masa panennya berbeda. Jagung membutuhkan waktu paling singkat, dipanen pada bulan Februari. Padi dipanen pada bulan Maret-April dan ketela pada bulan Juli-Agustus. Apabila menurut perhitungan petani, hujan masih akan cukup pada bulan Februari-Maret,

maka petani akan menanam kacang tanah atau kacang kedelai. Tanaman ini kemudian dapat dipanen bulan Juni-Juli sebagai persediaan pangan tambahan atau untuk dijual ke pasar sebagai tambahan pendapatan. Perbedaan musim yang sangat besar antara musim penghujan dan musim kemarau hanya nampak jelas di Jawa. Di luar Jawa istilah paceklik tidak begitu dikenal. Ini disebabkan karena pertama, disana terdapat lebih banyak hasil-hasil tanaman perdagangan yang diusahakan seperti kopi, lada dan karet rakyat. Kedua, karena hujan turun hampir sepanjang tahun (disebut hujan khatulistiwa). Di daerah-daerah seperti Sumatra Utara dan Sulawesi Selatan tanaman padi musim hujan ditanam bergilir dari satu daerah ke daerah lain. Di daerah-daerah ini tidak dikenal panen raya untuk padi, yang di Jawa hal ini terjadi pada bulan April-Juni. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan jenis tanaman adalah suhu udara. Secara keseluruhan suhu udara tidak banyak berubah dari bulan ke bulan. Rata-rata suhu udara adalah 27° C dengan suhu tertinggi 31° C dan terendah 23° C. Yang lebih penting lagi sebagaimana telah disebutkan di atas justru variasi suhu di dataran rendah dan daerah pegunungan yang berbeda kadang-kadang sampai 10° C. Pulau Sumatra penghasil utama tanaman perdagangan seperti karet, kopi, lada dan tembakau memakai daerah yang luas untuk tanaman-tanaman di luar padi. Sering dikatakan bahwa keterbatasan teknologi modern dan rendahnya tingkat pendidikan petani merupakan dua sumber penting kemiskinan di sektor pertanian di Indonesia. Keterbatasan akan dua faktor produksi tersebut yang sifatnya komplemanter satu sama lainnya mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas yang pada akhirnya juga membuat rendahnya tingkat pendapatan riil petani, sesuai makanisme pasar

yang sempurna. Penerapan teknologi modern bisa dalam berbagai macam bentuk, diantaranya intensitas pemakaian traktor dan pupuk nonorganik dan luas lahan irigasi teknis. Dengan memakai jumlah traktor per 10000 pekerja dan per 100 meter tanah garapan sebagai salah satu alat ukur, Tabel 2.1 membuktikan betapa rendahnya intensitas pemakaian teknologi modern di sektor pertanian di Indonesia. Jika dibandingkan dengan Negara-negara lain. Rendahnya penerapan teknologi modern tersebut juga terefleksi dari kecilnya luas lahan irigasi teknis sebagai suatu persentase dari luas lahan pertanian.

TABEL 2.1

Intensitas Penggunaan Traktor di Beberapa Negara Asia

Negara	Jumlah Traktor			
	Per 1000 pekerja		Per meter tanah garapan	
	1979-81	1996-98	1979-81	1996-98
Bangladesh	0	0	5	7
China	2	1	76	56
India	2	6	24	91
Indonesia	0	1	5	39
Jepang	209	681	2.723	4.830
Korea Selatan	1	50	14	779
Malaysia	4	23	77	238
Pakistan	5	12	50	150
Filipina	1	1	20	21
Sri Lanka	4	2	141	81
Thailand	1	10	11	123
Vietnam	1	4	38	206

Sumber : World Bank *database*

Selanjutnya tabel 2.2 menunujukan bahwa pada tahun 1996-1998 tercatat hanya sekitar 15,5 %, jauh lebih kecil dibandingkan misalnya china 38, 3 % atau India 33,6 %.

TABEL 2.2

Lahan Irigasi di Beberapa Negara di Asia

Negara	Lahan irigasi, % dari lahan pertanian	
	1979-1981	1996-98
Bangladesh	17,1	44,8
China	45,1	38,3
India	22,8	33,6
Indonesia	16,2	15,5
Jepang	56,0	54,6
Korea Selatan	56,6	60,5
Malaysia	6,7	4,8
Pakistan	72,7	81,2
Filipina	12,8	15,6
Sri Lanka	28,3	32,1
Thailand	16,4	23,1
Vietnam	25,6	42,0

Sumber : World Bank *database*

Keterbatasan teknologi modern dan rendahnya pendidikan petani juga membuat pola produksi pertanian yang diterapkan sangat sederhana yang tidak menghasilkan produksi yang optimal. Selain itu, pendidikan seorang petani yang rendah atau pengetahuan yang rendah mengenai potensi dan perubahan pasar juga mempengaruhi pemilihan komoditi usaha utamanya (*diversifikasi produksi*), yang sering kali bukan dari kategori komoditas-komoditas komersial sehingga tidak menghasilkan surplus uang yang besar. Sumber penyebab lainnya yang

membuat rendahnya pendapatan petani di Indonesia adalah ketersediaan lahan garapan yang dimiliki petani yang jauh dibawah skala usaha ekonomi dengan lahan yang sempit, terlebih lagi tanpa dukungan teknologi dan pendidikan, sangat sulit mengharapkan petani di Indonesia dapat berproduksi secara maksimum (produktif). Tahun 1973, penguasaan lahan kurang dari 0,5 % hektar (ha) tercatat sekitar 45,64 %, tahun 1983 turun menjadi 44,51 %, dan sensus pertanian terakhir tahun 1993 menunujukkan 41,87 % . Sementara pemilik lahan lebih dari 0,5 ha tahun 1973 tercatat 54,36 % tahun 1983, 55,49 %, dan tahun 1993 sebanyak 58,1 %. Jumlah petani gurem di Indonesia, yaitu dengan lahan hanya 0,2 ha atau kurang semakin meningkat. Pada tahun 1983 jumlah petani gurem dan buruh tani tanpa lahan tercatat sebanyak 9,532 juta orang dan pada tahun 1993 jumlahnya bertambah menjadi menjadi 10,937 orang.

Pada tahun 1983 luas lahan pertanian rata-rata per petani di Indonesia berkurang menjadi 0,83 pada tahun 1993. Walaupun belum ada sensus pertanian yang baru setelah tahun 1993, namun dapat diduga bahwa dalam 10 tahun belakangan ini lahan pertanian, khususnya di pulau jawa terus mengalami penyusutan sebagai akibat dari proses industrialisasi dan urbanisasi yang didorong oleh laju pertumbuhan penduduk yang rata-rata pertahun masih relative tinggi. Diperkirakan bahwa konvesi lahan pertanian ke nonpertanian di Indonesia rata-rata 30,000-50,000 ha per tahun. Ini berarti jumlah petani gurem atau buruh tani tanpa lahan meningkat terus, yang pada tahun 1999 diperkirakan petani telah mencapai sekitar 12 juta orang (Roosita,2002).

TABEL 2.3

Lahan Pertanian di Beberapa Negara di Asia

Negara	Lahan pertanian hektar per kapita	
	1979-81	1996-98
Bangladesh	0,10	0,06
China	0,10	0,10
India	0,254	0,17
Indonesia	0,12	0,09
Jepang	0,04	0,04
Korea Selatan	0,05	0,04
Malaysia	0,07	0,08
Pakistan	0,24	0,17
Filipina	0,11	0,08
Sri Lanka	0,06	0,05
Thailand	0,35	0,28
Vietnam	0,11	0,07

Sumber : World Bank *database*

Sebagai suatu perbandingan dengan banyak Negara lain, data Bank Dunia di tabel 2.3 menunujukkan bahwa lahan prtanian di Indonesi relative sempit di bandingkan jumlah penduduknya yang sangat banyak. Pada dekade 70-an, lahan pertanain di Indonesia tercatat sekitar 0,12 ha per kapita, lebih kecil daripada di Negara yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak, yakni India dengan luas lahan per kapitanya dua kali lipat luas lahan per kapita di Indonesia. China dengan penduduk di atas 1 miliar orang, pada tahun yang sama walaupun luas lahan pertaniannya lebih kecil daripada Indonesia, namun perbedaannya tidak terlalu besar. Pada dekade 90-an, luas lahan pertanian rata-rata per orang di Indonesia

menyusut menjadi 0,09 ha sementara di China tetap 0,10 ha, dan di India juga berkurang walaupun tetap jauh dibandingkan Indonesia.

2.2. Pembagian Bidang-Bidang Pertanian di Indonesia

2.2.1. Pertanian rakyat

Pertanian rakyat yaitu usaha pertanian keluarga di mana diproduksi bahan makanan utama seperti beras, palawija (jagung, kacang-kacangan dan ubi-ubian) dan tanaman-tanaman hortikultura yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Pertanian rakyat diusahakan di tanah-tanah sawah, ladang dan pekarangan. Walaupun tujuan penggunaan hasil-hasil tanaman ini tidak merupakan kriteria, namun pada umumnya sebagian besar hasil-hasil pertanian rakyat adalah untuk keperluan konsumsi keluarga. Di Jawa dan Madura (dari tahun 1963) hanya 21 % hasil padi dijual ke pasar, sedangkan jagung dan ketela masing-masing 24 % dan 30 % dari jumlah produksi.

Didalam pertanian rakyat hampir tidak ada usahatani yang memproduksikan hanya satu macam hasil saja. Dalam satu tahun petani dapat memutuskan untuk menanam tanaman bahan makanan atau tanaman perdagangan. Keputusan petani untuk menanam bahan makanan terutama didasarkan atas kebutuhan makan untuk seluruh keluarga petani, sedangkan putusannya untuk menanam tanaman perdagangan didasarkan atas iklim, ada tidaknya modal, tujuan penggunaan hasil tanaman tersebut dan harapan harga. Tanaman-tanaman perdagangan rakyat ini yang dikenal dengan nama hasil-hasil perkebunan rakyat meliputi tembakau, tebu rakyat, kopi, lada karet, kelapa, teh, cengkeh, panili, buah-buahan, sayur-sayuran dan bunga-bungaan.

2.2.2. Perkebunan

Perkebunan atau *Planatation*, tidak hanya dikenal di Indonesia tetapi dibanyak negara lain. Namun begitu pada umumnya perkebunan ini didapatkan didaerah-daerah bermusim panas di dekat khatulistiwa dan arena menggunakan sistem manajemen seperti pada perusahaan industri dengan memanfaatkan hasil-hasil penelitian dari teknologi terbaru maka sering pula disebut " industri perkebunan" atau industri pertanian. Sejarah perkebunan asing di Indonesia dimulai pada tahun 1870 dengan pengundangan Hukum Agraria oleh pemerintah kolonial Belanda yang memungkinkan pemilik modal besar di Negara Belanda dan negeri-negeri Eropa Barat lainnya menanam modalnya di Indoneisa. Hak-hak usaha yang diperoleh para penanam modal tersebut terkenal dengan nama hak-hak *erfpacht* yang meliputi jangka waktu maksimum 75 tahun dengan luas maksimum 360 hektar (900 acres). Hak-hak lain yang dapat diberikan kepada orang-orang asing adalah *hak opstaal* untuk mendirikan bangunan-banguan pabrik untuk usaha dan hak *eigendom* terutama untuk rumah-rumah tempat tinggal.

2.2.3. Kehutanan

Kegiatan pemungutan hasil hutan pada hakikatnya merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan (*management*) hutan. Di Indonesia hutan yang luasnya lebih dari 120 juta hektar itu dikategorikan berdasarkan rencana peruntukan ke dalam :

1. Hutan Lindung yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap tanah, tata air, iklim serta lingkungannya.

2. Hutan Suaka Alam yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap binatang, untuk keperlaun pengetahuan dan kebudayaan.
3. Hutan Produksi yaitu hutan yang memberi manfaat produksi kayu dan hasil hutan yang lain, berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berlaku, yang mengenal prinsip kekekalan hasil.
4. Hutan Wisata yaitu hutan yang menyediakan keindahan alamnya untuk kepentingan pariwisata.

2.2.4. Peternakan

Dilihat dari pola pemeliharaannya peternakan di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 kelompok :

2.2.4.1. Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan tradisional.

Ketrampilan sederhana dan menggunakan bibit lokal dalam jumlah dan mutu yang relative terbatas. Ternak pemakan rumput digembalakan di padang umum, di pinggir jalan dan sawah, dipinggir sungai atau di tegalan sendiri. Kalau siang hari diberi minum dan dimandikan seperlunya sebelum dimasukkan kedalam kandang. Pemeliharaan dengan cara ini dilakukan setiap hari dan dikerjakan oleh anggota keluarga peternak. Pada umumnya biaya yang dikeluarakan hanya untuk membeli bibit, pembuatan kandang dan peralatan-peralatan lain. Tujuan utamanya ialah sebagai hewan kerja dalam membajak sawah/tegalan, hewan penarik gerobak atau pengangkut beban, sedang kotorannya dipakai sebagai pupuk.

2.2.4.2. Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan semi komersial.

Ketrampilan yang mereka miliki dapat dikatakan lumayan. Penggunaan bibit unggul, obat-obatan dan makanan penguat cenderung meningkat, walaupun lamban. Jumlah ternak yang dimiliki 2-5 ekor ternak besar dan 5-100 ekor ternak kecil terutama ayam. Bahan makanan berupa hasil ikutan panen seperti bekatul jagung dan rumput-rumputan yang dikumpulkan oleh tenaga dari keluarga sendiri. Tujuan utama memelihara ternak untuk menambah pendapatan keluarga dan konsumsi sendiri.

2.2.4.3. Peternak komersial

Usaha ini dijalankan oleh golonagn ekonomi yang mempunyai kemampuan dalam segi modal dan sarana dengan teknologi yang agak modern. Semua tenaga kerja dibayar dan makanan ternak terutama dibeli dari luar dalam jumlah yang besar. Tujuan utamanya ialah mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya. Biaya produksi ditekan serendah mungkin agar dapat menguasai pasar.

Salah satu contoh ialah Bimas Ayam dengan tujaun pokoknya :

- Swasembada produksi telur dan daging ayam.
- Peningkatan produksi telur dan daging ayam.
- Perbaikan gizi.

2.2.5. Perikanan

Usaha perikanan di Indonesia masih merupakan perikanan rakyat dengan menggunakan perahu layar. Penggunaan perahu layar jauh lebih banyak daripada perahu motor. Walaupun lambat tapi dari tahun ke tahun

penggunaan kapal motor terus meningkat. Pada tahun 1968 hanya 2 % penggunaan perahu motor sedang perahu layar ± 98 %. Sepuluh tahun kemudian penggunaan perahu motor meningkat menjadi 9 % (1978) dan pada tahun 1985 telah meningkat lagi menjadi 32 %. Peningkatan ini berhubungan pula dengan kebijakan pemerintah dalam pemberian kredit pada nelayan dalam bentuk kapal motor.

2.3. Kebijakan Pertanian di Indonesia

Teori ekonomi tradisional mengatakan bahwa dalam keadaaan persaingan bebas maka akan tercapailah efisiensi ekonomi yang tertinggi. Tetapi dalam kenyataannya apa yang disebut persaingan bebas yang sempurna tidak ada. Yang ada ialah peersaingan yang tidak sempurna di mana ada unsur-unsur kekuatan ekonomi yang mempengaruhi dan memberi corak khusus pada bekerjanya gaya-gaya pasar. Salah satu kekuatan yang berpengaruh besar pada bekerjanya gaya-gaya ekonomi adalah pemerintah. Tidak ada satu negara pun pada saat ini di mana pemerintah tidak memainkan peranan dalam perekonomian. Bahkan negara-negara di mana sistem kapitalisme merupakan dasar perekonomian, seperti misalnya AS, kini pemerintah makin besar peranannya dalam setiap sektor pertanian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian ada yang baik tetapi ada juga yang kurang baik. Tetapi kita tidak pernah akan dapat menentukan batas-batas campur tangan pemerintah yang ideal. Masalahnya bukanlah banyak atau sedikitnya campur tangan dan peranan pemerintah tetapi bagaimana dan dalam bidang apa pemerintah dapat membantu mendorong warga masyarakatnya untuk mencapai efisiensi tertinggi dalam usaha meningkatkan kesejahteraannya. Inilah

persoalan yang dipelajari oleh kebijaksanaan pertanian yaitu bagian dari kebijakan ekonomi yang menyangkut kepentingan sektor pertanian.

Kebijakan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijaksanaan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik dan akibatnya tingkat penghidupan petani yang lebih tinggi dan kesejahteraan yang sempurna. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini pemerintah baik di pusat maupun di daerah mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu. Ada yang berbentuk Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, keputusan Gubernur dan lain-lain. Peraturan-peraturan itu pada dasarnya dapat dibagi dua yaitu kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat *pengatur* (*regulating policies*) dan pembagian pendapatan yang lebih adil dan merata (*distributive policies*). Kebijakan yang bersifat pengaturan misalnya *peraturan rayoneering* dalam perdagangan/distribusi pupuk sedangkan contoh peraturan yang sifatnya mengatur pembagian pendapatan adalah *penentuan harga* kopra minimum yang berlaku sejak akhir 1969 di daerah-daerah penghasil kopra di Sulawesi.

Persoalan yang selalu tidak mudah diatasi adalah persolan keadilan. Hampir setiap kebijaksanaan jarang akan disambut dengan baik oleh semua pihak. Selalu ada saja pihak yang memperoleh manfaat lebih besar dari pihak lainya dan bahkan ada yang dirugikan. Itulah sebabnya masalah kebijaksanaan pertanian bukanlah terletak pada banyak sedikitnya campur tangan pemerintah, tetapi pada berhasil

tidaknya kebijaksanaan itu mencapai sasarannya dengan sekaligus mencari keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya dalam kebijaksanaan harga minimum dan maksimum bagi beras yang mulai berlaku akhir tahun 1969 tujuan pemerintah adalah merangsang peningkatan produksi. Kalau harga padi tidak akan turun lebih rendah dari batas tertentu maka petani akan lebih merasa aman dan pasti dalam perhitungan-perhitungannya. Dan bertambah besar keinginannya untuk menaikkan produksi dengan menggunakan lebih banyak pupuk, bibit unggul dan lain-lain. Dalam hal ini petani mendapat manfaat dan ini berarti perlindungan bagi petani oleh pemerintah. Tetapi di pihak lain harag maksimum merupakan perlindungan bagi konsumen. Kalau harga naik lebih tinggi dari harga maksimum yang ditentukan maka pemerintah mengeluarkan stoknya dan menjualnya ke pasar. Dengan demikian harga beras akan turun kembali dan konsumen terlindungi.

Penentuan batas antara harga minimum dan harga maksimum juga merupakan perlindungan pemerintah pada golongan pedagang dan pabrik-apbrik penggilingan padi. Suatu tingkat keuntungan yang menarik akan mendorong kegiatan bidang pengolahan padi. Jadi setiap pihak dalam produksi dan perdagangan beras mempunyai kepentingan tertentu yang berhubungan dengan adanya kebijakan harga beras, sehingga tinggi rendahnya harga minimum dan harga maksimum mempunyai pengaruh pada bagian yang diterima oleh setiap pihak itu. Karena itu kebijaksanaan pertanian yang baik adalah yang dapat mencapai tujuan nasional untuk menaikkan produksi secara optimal dengan perlakuan yang adil pada pihak-pihak yang bersangkutan. Walaupun jelas sekali

bahwa kebijaksanaan pertanian yang berupa peraturan-peraturn itu mutlak diperlukan bagi kepentingan semua pihak, namun haruslah peraturan-peraturan itu tidak terlalu berlebihan.

Peraturan yang berlebih-lebihan tidak saja akan merusak hubungan-hubungan pasar yang sehat yang sangat diperlukan bagi kemajuan dan efisiensi ekonomi, tetapi bahkan dapat pula mematikan semangat dan inisiatif seseorang dalam berusaha. Kebijaksanaan pertanian yang mangandung unsur subsidi yang berlebihan pada suatu golongan dalam masyarakat mengandung bahaya karena golongan tersebut akan menjadi terlalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah. Kebijaksanaan pertanian yang lebih spesifik meliputi berbagai bidang yang penting di antaranya adalah kebijaksanaan harga, kebijaksanaan pemasaran dan kebijaksanaan struktural. Bidang-bidang kebijaksanaan yang lebih khusus lainnya menyangkut pengaturan-pengaturan kelembagaan baik yang langsung terdapat disektor pertanian maupun disektor-sektor lain yang ada hubungannya dengan sektor pertanian, misalnya *landreform,* penyuluh pertanian dan lain-lain.

2.3.1. Kebijaksanaan Harga

Kebijaksanaan ini merupakan salah satu kebijaksanaan yang terpenting di banyak Negara sehingga disebut *kebijaksanaan harga dan pendapatan* (*price and income policy).* Segi harga dari kebijaksanaan itu bertujuan agar pendapatan petani tidak terlalu berfluktuasi dari musim ke musim dan dari tahun ke tahun. Kebijaksanaan harga dapat mengandung pemberian suatu penyangga (*support*) atas harga-harga pertanian supaya tidak terlalu merugikan petani atau langsung mengandung sejumlah subsidi tertentu bagi

petani. Di banyak Negara di Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan lain-lain, banyak sekali hasil-hasil pertanian seperti gandum, kapas, padi gula biet dan lain-lain mendapat perlindungan pemerintah berupa harga penyangga dan atau subsudi. Indonesia baru mulai mempraktekkan kebijaksanaan harga untuk bebrapa hasil pertanian sejak tahun 1969. Secara teoritis kebijaksanaan harga dapat dipakai untuk tujuan yaitu :

1. Stabilisasi harga hasil-hasil pertanian terutama pada tingkat petani.
2. Meningkatkan pendapatan petani melalui perbaikan dasar tukar (*term of trade*).
3. Memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produksi.

Kebijaksanaan harga di Indonesia ditekankan pada tujuan yang pertama. Stabilisasi harga hasil-hasil pertanian dalam keadaan harga-harga umum yang stabil berarti pula kestabilan pendapatan. Tujuan yang kedua banyak sekali dilaksanakan bagi hasil-hasil pertanian di Negara-negara yang sudah maju dengan alasan pokok pendapatan rata-rata sektor pertanian terlalu rendah dibandingkan dengan penghasilan di luar sektor pertanian. Memang dengan diperkenalkannya berbagai mesin pertanian maka produktivitas dan produksi pertanian di negara tersebut mengalami kemajuan yang sangat pesat sehingga harga menurun. Dalam keadaan demikian kebijaksanaan harga digunakan untuk menghambat penurunan harga-harga tersebut baik dengan jalan mengurangi penawaran maupun dengan menambah permintaan dipasar. Tujuan yang kedua ini sukar dilaksanakan di Negara-negara yang jumlah petaninya berjuta-juta dan atau terlalu kecil seperti di Indonesia karena persoalan

administrasinya sangat kompleks. Karena pada prinsipnya kebijaksanaan harga yang demikian ini merupakan usaha memindahkan pendapatan dari golongan bukan pertanian ke golongan pertanian, maka hal ini bisa dilaksanakan dengan mudah di Negara-negara yang sudah maju dan kaya, dimana golongan penduduk di luar pertanian jumlahnya jauh lebih besar dengan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada golongan penduduk pertanian. Di Negara-negara ini penduduk sektor pertanian rata-rata di bawah 10 % dari seluruh penduduk, sedangkan di negara kita masih antara 60 % - 70 %. Tujuan kebijaksanaan yang ketiga dalam praktek dilaksanakan di Negara-negara yang sudah maju bersamaan dengan tujuan kedua yaitu dalam bentuk pembatasan jumlah produksi dengan pembayaran kompensasi. Berdasarkan ramalan harga, pemerintah membuat perencanaan produksi dan petani mendapat pembayaran kompensasi untuk setiap hektar tanah yang diistirahatkan.

2.3.2. Kebijakan Pemasaran

Di samping kebijaksanaan harga untuk melindungi petani produsen, pemerintah dapat mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan khusus dalam kelembagaan perdagangan dengan tujuan yang sama, tetapi dengan tekanan pada perubahan mata rantai pamasaran dari produsen ke konsumen, dengan tujuan utama untuk memperkuat daya saing petani. Di Negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Kenya apa yang dikenal dengan nama Badan Pemasaran Pusat (*Central Marketing Board*) berusaha untuk mengurangi pengaruh fluktuasi harga pasar dunia atas penghasilan petani. Badan pemasaran ini

sangat berhasil di Inggris yang mulai sesudah depresi besar tahun 1930 untuk bulu domba, milk, telur dan kentang.

Di Negara kita pembentukan sindikat dan PT eksportir kopi, Badan Pengurusan Kopra, Badan Pemasaran Lada dan lain-lain, pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama dengan Badan-badan pemasaran Pusat di Afrika dan Inggris itu. Masalah yang dihadapi di negara kita adalah kurangnya kegairahan berproduksi pada tingkat petani, tidak ada keinginan untuk mengadakan penanaman baru dan usaha-usaha lain untuk menaikkan produksi karena persentase harga yang diterima oleh petani relative rendah dibandingkan dengan bagian yang diterima golongan-golongan lain. Badan-badan pemasaran yang dibentuk dimaksudkan untuk memberikan jaminan harga minimum yang stabil pada petani. Misalnya pada bulan September 1969, harga kopra ditentukan Rp.2.600,- per kwintal dan berada pada tingkat yang sama sampai pertengahan tahun 1970. Pada pasaran internasional, Badan Pengurus Kopra (BPK) berusaha menghilangkan persaingan yang tidak sehat di antara eksportir kopra Indonesia. Dana-dana yang dipungut dari hasil kopra dijamin dikembalikan pada daerah yang bersangkutan untuk membantu kegiatan penelitian pada daerah yang bersangkutan untuk membantu kegiatan penelitian pada daerah yang bersangkutan dan usaha merehabilitasi perkebunan-perkebunan kopra. Sehubungan dengan adanya usaha memperkuat kedudukan pengusaha eksportir lemah telah diambil kebijaksanaan kredit, yaitu memberikan fasilitas kredit dengan bunga yang relative rendah dan menyederhanakan prosedur ekspor. Sedangkan mengenai pengangkutan

barang- barang ekspor diusahakan penyediaan pengangkutan (dalam hal ini adalah Kapal).

Disamping kebijaksanaan pemasaran hasil-hasil tanaman perdagangan untuk kspor, kebijaksanaan ini meliputi pula pengaturan distribusi sarana-sarana produksi bagi petani. Pemarintah berusaha menciptakan persaingan yang sehat di antara para pedagang produksi tersebut dengan harga yang tidak terlalu tinggi. Jadi di sini jelas bahwa kebijaksanaan pemasaran merupakan usaha campur tangan pemerintah dalam bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar. Di satu pihak pemerintah dapat mengurangi pengaruh kekuatan-kekuatan pasar supaya tidak terlalu merugikan para pedagang dan petani, tetapi dipihak lain persaingan dapat didorong untuk mencapai efisiensi ekonomi yang tinggi.

2.3.3. Kebijaksanaan Struktural

Kebijaksanaan struktural dalam pertanian dimaksudkan untuk memperbaiki struktur produksi misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan pengusahaan alat-alat pertanian yang baru dan perbaikan prasarana pertanian pada umumnya baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi. Kebijaksanaan sturktural ini hnaya dapat terlaksana dengan kerjasama yang erat dari beberapa lembaga pemerintah. Perubahan struktur yang dimaksud di sini tidak mudah mencapainya dan biasanya memakan waktu yang lama. Hal ini disebabkan karena sifat usahatani yang tidak saja merupakan unit usaha ekonomi tetapi juga merupakan bagian dari kehidupan petani dengan segala aspeknya. Karena itu tindakan ekonomi saja tidak akan mampu mendorong perubahan struktural adalam sektor pertanian sebagaimana dapat dilaksanakan dengan lebih mudah

pada sektor industri. Pengenalan teknologi baru dengan penyuluhan-penyuluhan yang intensif merupakan satu contoh dari kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan pemasaran yang telah disebutkan di atas sebenarnya dimaksudkan pula untuk mempercepat proses perubahan struktural di sektor pertanian dalam komoditi-komoditi pertanian. (Mubyarto,1995)

2.4. Investasi Pada Sektor Pertanian di Indonesia

Pembangunan Pertanian di Indonesia tetap dianggap terpenting dari keseluruhan pembangunan ekonomi, apalagi semenjak sektor pertanian ini menjadi penyelamat perekonomian nasional karena justru pertumbuhannya meningkat, sementara sektor lain pertumbuhannya negatif. Beberapa alasan yang mendasari pentingnya pertanian di Indonesia : (1) potensi sumberdayanya yang besar dan beragam, (2) pangsa terhadap pendapatan nasional cukup besar, (3) besarnya penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini dan (4) menjadi basis pertumbuhan di pedesaan Potensi pertanian yang besar namun sebagian besar dari petani banyak yang termasuk golongan miskin adalah sangat ironis terjadi di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi sektor pertanian keseluruhan. Disisi lain adanya peningkatan investasi dalam pertanian yang dilakukan oleh investor PMA dan PMDN yang berorientasi pada pasar ekspor umumnya padat modal dan perananya kecil dalam penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang tersebut ditambah dengan kenyataan justru kuatnya aksesibilitas pada investor asing /swasta besar dibandingkan dengan petani kecil dalam pemanfaatan sumberdaya pertanian di Indonesia, maka

dipandang perlu adanya grand strategy pembangunan pertanian melalui pemberdayaan petani kecil. Melalui konsepsi tersebut, maka diharapkan mampu menumbuhkan sektor pertanian, sehingga pada gilirannya mampu menjadi sumber pertumbuhan baru bagi perekonomian Indonesia.

Investasi pada sektor pertanian dilakukan dalam dua bentuk yaitu investasi fisik atau material dan investasi immaterial (human investment). Investasi dalam bentuk fisik seperti : bibit, alat-alat pertanian, ternak dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk immaterial dilakukan dengan cara pemberian ketrampilan, latihan khusus dan penyuluhan-penyuluhan mengenai pertanian. Pemisahan antara investasi fisik dan immaterial mempunyai implikasi yang sangat penting dalam kebijakan pembangunan pertanian, lebih-lebih di Negara kita dimana tidak sema alat-alat pertanian dan mesin yang dikembangkan dapat diterapkan sperti di Negara-negara yang sudah maju. Memperbaiaki car-cara berproduksi dan penyebaran cara-cara baru kepada petani melalui pendidikan dan penyuluhan merupakan investasi yang hasilnya tidak dapat dianggap kecil.

2.4.1. Perkembangan Investasi di Indonesia

Krisis berdampak secara nyata terhadap penurunan investasi tetap (*fixed Investment*), khususnya pada 1998 dan 1999. Pada harga konstan, investasi tetap pada tahun 1997 dan tahun-tahun sebelumnya diperkirakan sekitar 31 – 32 persen dari GDP. Investasi tetap (seperti gedung, mesin-mesin, dan alat transport sektor bisnis) secara nasional telah menurun dari level lebih dari 30 persen menjadi level kurang dari 20 persen GDP, dan setelah adanya otonomi daerah telah terjadi *recovery* pada tahun 2000 dengan bergerak menjadi 22

persen. Sementara itu investasi dalam bentuk *inventory* (benih, cadangan bahan baku, dan stock bahan jadi), telah menurun dengan angka negatif. Nilai investasi dalam inventory negatif ini berarti bahwa para petani terpaksa memakan cadangan benihnya yang seharusnya ditanam kembali. Demikian juga apa yang terjadi di sektor bisnis dan industri, stock bahan baku dan barang jadi sangat berkurang yang disebabkan oleh kesulitan perusahaan atau ketidakpastian pasar.

Secara keseluruhan investasi tetap sudah menunjukkan *recovery* pada tahun 2000 lalu, tetapi jika dilihat dari perkembangan persetujuan investasi di BKPM, pada 2001 dan 2002 terlihat menurun kembali. Tabel 2.4 memperlihatkan perkembangan persetujuan investasi di BKPM sejak tahun 1991. Walaupun terdapat perbedaan yang besar antara persetujuan investasi dan realisasi, tetapi perkembangan persetujuan invstasi itu sendiri menggambarkan tren antar tahun. Pada tahun krisis 1998 dan 1999 persetujuan investasi domestik menurun dari 718 proyek pada tahun 1997 menjadi 324 pada tahun 1998 dan menjadi 237 pada tahun 1999. Pada tahun 2000 persetujuan investasi domestik telah meningkat menjadi 392, tetapi turun kembali menjadi 264 pada tahun 2002. Sementara itu jika dilihat dari perkembangan persetujuan PMA di BKPM, khususnya sejak krisis menunjukkan trend yang terus meningkat, kecuali pada tahun 2001 dan 2002 terlihat menurun kembali.

Tabel 2.4.

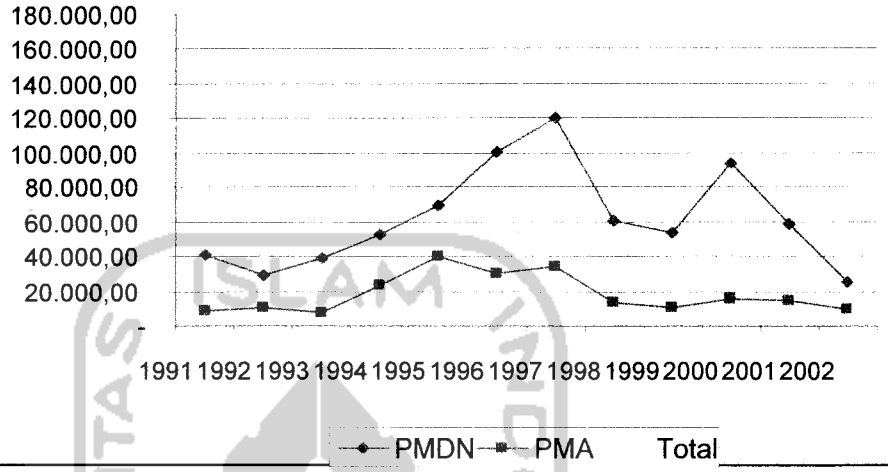
Perkembangan Persetujuan Projek

Tahun	Proyek yang disetujui		Total
	PDMN	PMA	
1991	804	376	1.170
1992	436	305	741
1993	548	329	877
1994	823	449	1.272
1995	775	799	1.574
1996	810	959	1.769
1997	718	790	1.508
1998	324	1.035	1.364
1999	237	1.164	1.401
2000	392	1.541	1.933
2001	264	1.333	1.597
2002	185	1.141	1.326

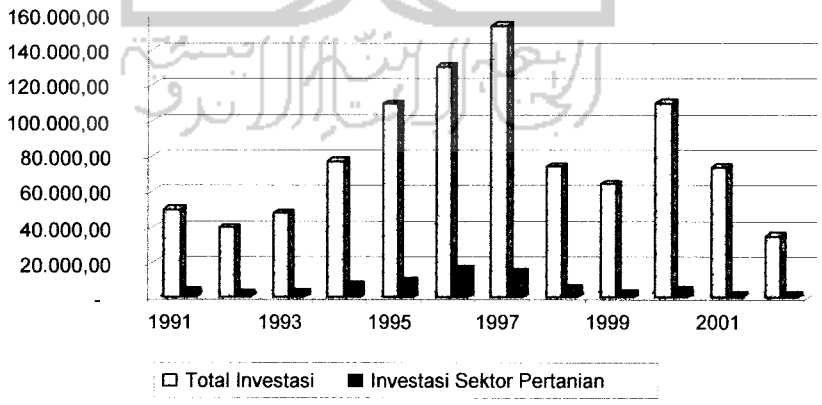
Sumber: BPS, diolah

Dilihat dari nilai investasi yang disetujui nampak bahwa otonomi daerah membawa dampak secara signifikan terhadap investasi di Indonesia. Secara total nilai investasi pada tahun 1999 masih menunjukkan nilai sebesar Rp 64.440,5 milyar dan tahun 2000 terus meningkat hingga tinggal Rp 107.830,4 milyar (lihat gambar 2.1).

Gambar 2.1
Perkembangan Persetujuan Nilai Investasi 1991-2002



Gambar 2.2
Perbandingan Nilai Investasi Sektor Pertanian Terhadap Total Investasi Yang Disetujui



Dari total nilai investasi yang disetujui, nilai investasi dalam sektor pertanian nampak masih relatif sangat kecil. Dalam tahun 1991 nilai investasi dalam sektor pertanian hanya mencapai Rp 3.777,4 milyar atau 7,58 persen dari total nilai investasi dan dalam tahun 1996 meningkat tajam menjadi Rp 16.071,4 milyar atau 12,3 persen. Dalam tahun 2001 persetujuan nilai investasi dalam sektor pertanian hanya mencapai Rp 1.318,4 atau 1,778 persen dan dalam tahun 2002 sedikit meningkat menjadi Rp.1.453,8 atau 4,14 persen.

2.5. Perkembangan Ketenagakerjaan Sektor Pertanian di Indonesia

Dampak krisis moneter dan ekonomi telah menimbulkan kelesuan ekonomi di semua sektor. Perusahaan yang semula diharapkan akan tumbuh dan berkembang menyerap angkatan kerja baru, terpaksa tertunda dalam kurun waktu 3-5 tahun mendatang. Sementara sudah mulai banyak perusahaan yang sedang mempersiapkan pemutusan hubungan kerja bagi sebagian pekerjanya. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenagakerjaan, yaitu faktor permintaan dan penawaran. Faktor permintaan dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi, sedangkan faktor penawaran ditentukan oleh perubahan struktur umur penduduk.

Sesuai dengan Konvensi *International Labour Organization* (ILO), batasan penduduk usia kerja yang digunakan di sini adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak aktif secara

ekonomi dengan kegiatan antara lain, sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya. (Makmun, 2002).

Salah satu tujuan yang penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengejar pertambahan angkatan kerja, lebih-lebih bagi negara berkembang, terutama Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja. Ada beberapa faktor mengapa hal tersebut lebih menonjol atau penting bagi negara berkembang. Pertama, pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung tinggi, sehingga cenderung melebihi pertumbuhan kapital. Kedua, demografi profil lebih muda, sehingga lebih banyak penduduk yang masuk ke lapangan kerja. Ketiga, struktur industri di negara berkembang, yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi rendah, serta tingkat keterampilan penduduk yang belum memadai, membuat usaha penciptaan lapangan kerja menjadi semakin kompleks. Dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (diatas 8%) maka penciptaan lapangan kerja baru akan mampu memenuhi tambahan angkatan kerja, ini yang terjadi di Indonesia sebelum tahun 1990 s/d 1997.

Namun dengan adanya krisis moneter, dimana tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif, yaitu menurut perkiraan BPS, tahun 1998 pertumbuhan antara –13,6% s/d –15% dan tahun 1999 pertumbuhan antara –2% s/d –5,1%, akan membuat industri yang ada tidak mampu menciptakan kesempatan kerja yang baru untuk menampung tambahan-tambahan angkatan kerja. Ada beberapa faktor yang membuat industri mengalami kesulitan dalam

upaya meningkatkan kesempatan kerja. Yang pertama, naiknya suku bunga pinjaman membuat investor menunda untuk melakukan investasi baru. Yang kedua, krisis keuangan yang diikuti dengan ketidakstabilan politik membuat kepercayaan investor atau depositor terhadap industri perbankan di Indonesia mencapai titik terendah. Terjadilah *capital flight*. Yang ketiga, meskipun turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya, mampu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar international, namun kenyataannya nilai eksport Indonesia tidak mengalami peningkatan yang tajam. Akibat dari hal tersebut adalah *capital formation* tidak terbentuk, bahkan cenderung negatif. Penciptaan lapangan kerja tidak terjadi, bahkan yang terjadi adalah meningkatnya pengangguran, mengingat banyak perusahaan yang mengurangi aktivitas produksinya atau bahkan menutup usahanya.

Oleh karena itu sektor pertanian sebagai sektor yang mempunyai Alokasi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia di harapkan bisa tetap tumbuh dan berkembang sehingga tingkat pengganggguran bisa turun, dan memberikan kontribusi bagi perekonomian. Data dari BPS menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dari tahun ke tahun masih memberikan kontribusi yang tinggi yaitu pada tahun 1997 mencapai 41,1% dari total tenaga kerja di Indonesia. Akibat adanya kebijakan otonomi daerah penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian meningkat dari 44,98% pada tahun 1998 dan menjadi 45,27% pada tahun 2000.

2.5.1. Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi volume produksi atau keterkaitan antara pertumbuhan output dengan peningkatan produktivitas adalah dengan sebuah model sederhana sebagai berikut (Danoerdoro, 2002).

Y = LP x Pv

Di mana Y = besarnya produksi dalam setahun,

LP = luas panen yang umumnya dihitung pada basis tahunan.

Pv = produktivitas

Data dari bank dunia tentang perkembangan pertanian dapat digunakan sebagai informasi global mengenai perbedaan-perbedaan dalam pertumbuhan volume/nilai produktivitas di sektor pertanian antarnegara. Seperti tabel 2.5, satu hal yang sangat menarik dari data tersebut adalah bahwa perbedaan rasio NT terhadap jumlah pekerja antara kelompok Negara-negara berpenghasilan rendah/menengah dan kelompok Negara-negara berpenghasilan tinggi sangat besar. Sebagai contoh, di jepang dan Italia rasio tersebut mencapai lebih dari 10.000 U$ dolar, sedangkan di Indonesia jauh dibawah 1.000 dolar AS; Walaupun selama periode 1979-2000 meningkat sekitar 22%. Selama periode tersebut, indeks produksi hasil panen (nonmakanan) dan indeks produksi makanan di Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, masing-masing, 77% dan 90%. Hal lain yang menarik dari data tersebut bahwa di antara Negara-negara ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan tingkat produktivitas terendah setelah Vietnam. Sedangkan Malaysia adalah negara terunggul di dalam kelompok ASEAN dengan produktivitas di atas 3.000 US dolar. (Tambunan, 2002)

Tabel 2.5

Output dan Produktivitas di Sektor Pertanian 1979-2000

	Indeks produksi Hasil panen (crops)		Indeks produksi makanan		NT per pekerja	
Negara	1979-81	1998-2000	1979-81	1998-200	1979-81	1998-200
Argentina	83,5	159,5	91,7	137,9	7.155	9.983
Bangladesh	80,0	110,4	79,2	114,5	217	292
China	67	141,5	60,7	168,5	161	316
El savador	120,4	108,5	90,8	121,2	1.925	1.690
Honuras	90,4	116,5	8,2	112,4	696	1.008
India	70,9	122,1	68,1	124,6	272	395
Indonesia	**66,2**	**117,4**	**62,8**	**119.1**	**609**	**742**
Italia	106,1	105,6	101,4	104,8	10.016	23.906
Jepang	107,9	88,3	94,0	92,4	15.698	30.620
Korea Selatan	87,8	106,4	77,6	112,3	3.800	12.252
Malaysia	74,7	111,2	55,4	134,1	3.939	6.578
Meksiko	86,5	121,6	83,8	128,4	1.482	1.742
Pakistan	65,6	125,4	66,4	143,3	394	626
Paraguay	58,7	110,4.	61,0	132,8	2.641	3.512
Peru	82,2	162,9	77,3	161,7	1.194	1.569
Filipina	88,4	112,9	86,1	128,4	1.347	1.342
Srilanka	99,3	113,9	98,3	115,7	638	734
Thailand	78,9	112,9	80,0	113,1	634	939
Turki	76,6	114,7	75,8	113,0	1.860	1.858
Vietnam	66,7	158,5	63,8	152,2	tad*)	236

Sumber : World Bank database

pemerintah daerah dalam desentralisasi Indonesia. Di lain pihak pembangunan pertanian memang memerlukan otonomi daerah. Pertama, pembangunan pertanian membutuhkan apresiasi yang tinggi terhadap keaneka-ragaman. Aspek ini merupakan pilar keunggulan pertanian. Keanekaragaman tersebut ditunjukkan oleh jenis produk yang bersifat '*local-specific*', disesuaikan dengan sumberdaya lokal, kondisi sosial budaya, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda antar wilayah. Adanya otonomi daerah memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mewujudkan semua hal tersebut. Masing masing daerah dapat menentukan jenis pertanian yang akan dikembangkan dan bagaimana cara pengembangannya.

Hal yang sama juga perlu diperhatikan dengan pola pengembangan sarana pengairan yang juga cenderung disama-ratakan untuk semua daerah. Disisi lain, dengan otonomi masing-masing daerah akan dituntut untuk mengembangkan pola pengembangan dan teknologi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Kedua, pembangunan pertanian membutuhkan keluwesan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan itu sendiri, sesuai dengan keaneka-ragaman jenis produk, lokasi, dan kondisi pelaku usahanya. Hal ini membutuhkan fokus perhatian dari para perencana dan pelaku kegiatan pembangunan. Otonomi daerah juga lebih memungkinkan prinsip ini dapat diterapkan dengan lebih konsisten.

Selain itu diharapkan peran pemerintah (pusat) yang sentralistik akan sangat berkurang dalam mengimplentasikan kegiatan pengembangan secara langsung. Peran tersebut akan berubah menjadi peran dukungan, fasilitasi, dan regulasi, serta peran untuk mendorong terwujudnya lingkungan strategis yang kondusif (kondisi

2.6. Keterkaitan Kebijakan Otonomi Daerah dan Pertanian di Indonesia.

Penetapan UU no 22 tahun 1999 (yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang RI No.32 Tahun 2004) tentang Pemerintahan Daerah dan UU no 25 tahun 1999 (yang kemudian direvisi Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian telah menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dari banyak negara di dunia yang kembali mengarahkan proses kehidupan berbangsa dan bernegaranya dalam satu eksperimen besar menuju ke proses desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasi mengantarkan perubahan bobot dari pemerintah ke masyarakat dan dari pusat ke daerah. Hal ini merupakan bagian dari proses yang lebih besar lagi, yaitu menuju ke demokratisasi dalam semangat kedaulatan rakyat yang sebenarnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses desentralisasi diharapkan akan membentuk masyarakat yang lebih berdaulat, demokratis, lebih terbuka, dan lebih partisipatif, yang kemudian dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Hal tersebut kemudian harus diwujudkan dalam berbagai aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi yang dilakukannya.

Dengan desentralisasi setiap daerah artinya masyarakat di daerah yang bersangkutan dapat menetapkan strategi pengembangan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi dan kepentingan mereka. Strategi pembangunan tidak lagi menjadi sebuah rencana dan rancangan yang ditentukan oleh segelintir orang saja tetapi merupakan sebuah gerak bersama yang penuh keragaman. Diantara kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat lebih berkembang dengan desentralisasi adalah pembangunan pertanian. Sektor pertanian yang diatur sebagai bagian dari

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

Hasil penelitian *Ken martina k* dk*k* mengenai "*Dampak transformasi struktur ekonomi terhadap kesempatan kerja dan output*" menunjukkan bahwa Penyerapan tenaga kerja dari tahun ke tahun meningkat, seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Karena jumlah angkatan kerja yang meningkat setiap tahun lebih besar dari jumlah penyerapannya mengakibatkan terjadinya tingkat pengangguran. Trend pengangguran dari tahun 1996 –2000 tidak terlalu tajam, namun pada tahun 2001-2003 meningkat cukup tajam sekitar 37%. Hal ini menunjukkan bahwa sejak krisis hingga 2002, belum ada tanda-tanda pemulihan ekonomi, khususnya pada sektor ketenagakerjaan. Jika penyerapan tenaga kerja di lihat dari berbagai sektor, menunjukkan sektor pertanian masih berada pada urutan tertinggi, diikuti oleh sektor perdagangan, industri dan jasa kemasyarakatan. Sedangkan sektor-sektor lainnya relatif kecil. Kontribusi PDB berdasarkan sektor, menempati urutan tertinggi adalah sektor industri, disusul sektor perdagangan, sektor pertanian dan sektor jasa.

Hasil penelitian *Suryana, A.* dan *Kariyasa, K.* tentang pengembangan Sistem Usaha Tani Padi dengan Wawasan Agribisnis (SUTPA) di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah dan Jawa Barat menunjukkan bahwa secara finansial, dengan teknologi yang lebih baik akan memberikan keuntungan kepada petani sebesar 14,1% - 24,1% lebih tinggi dari pada teknologi petani. Pengembangan agribisnis dan agroindustri di pedesaan juga akan mampu

Dalam penelitian *Budiman Hutabarat,dkk* yang berjudul" Analisis Dampak Investasi Publik Terhadap Sektor Pertanian" menunjukan bahwa Investasi publik melalui pembangunan sistem penelitian, pengembangan dan penyuluhan pertanian memberikan sumbangan secara nyata terhadap produktivitas faktor total padi nasional. Hal ini seyogyanya dapat menjadi penarik semakin besarnya perhatian pemerintah untuk meningkatkan investasi melalui penyediaan anggaran pembangunan fasilitas-fasilitas dan kebutuhan publik di bidang pertanian, tidak terbatas hanya komoditas padi. Demikian pula tersedianya fasilitas jalan yang mempunyai dampak positif terhadap perubahan indeks (produktivitas faktor total) PFT, tidak boleh dilupakan.

Adanya hubungan sinergi yang dibangkitkan oleh kegiatan penelitian, pengembangan dan penyuluhan dalam mempengaruhi produksi agregat sektor pertanian, subsektor tanaman pangan, produksi, produktivitas dan produktivitas faktor total padi, subsektor perkebunan. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa peran penelitian dalam menghasilkan teknologi intensifikasi telah memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan produktivitas hasil-hasil komoditas pertanian maupun dalam menciptakan efisiensi usaha. Meskipun demikian, dalam penyebarluasan teknologi tersebut sangat diperlukan dukungan sistem penyuluhan yang lebih efektif lagi. Sinergi antara penelitian dan penyuluhan akan memberikan dorongan yang kuat dalam kerangka peningkatan kuantitas maupun kualitas produksi sektor pertanian. Investasi publik melalui anggaran pembangunan untuk sektor pertanian beserta komponen-komponennya masih sangat diperlukan untuk menciptakan partisipasi dan rangsangan kepada masyarakat luas untuk secara

sektor pertanian beserta komponen-komponennya masih sangat diperlukan untuk menciptakan partisipasi dan rangsangan kepada masyarakat luas untuk secara bersama-sama meningkatkan luas areal pertanaman, produktivitas dan perbaikan mutu hasil, sehingga pada gilirannya dapat memberikan peningkatan produksi nasional untuk tujuan ekspor dan sekaligus peningkatan pendapatan petani.

Hasil penelitian *Umi Pudji Astuti,* mengenai "*Kesempatan Kerja dan Pertumbuahn Ekonomi*" menunjukkan bahwa sektor pertanian dan pedesaan perlu diarahkan untuk menjadi penggerak utama dan sektor andalan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan sektor pertanian diyakini mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional dan sekaligus mengatasi masalah pemerataan dan pengentasan kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Selama krisis ekonomi, secara keseluruhan ekonomi nasional selama tahun 1998 mengalami kontraksi sebesar 13,68 %. Namun di tengah krisis ekonomi ini sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan 0,22 % (BPS. 1999). Pada tahun 1968 – 1990, PDB sektor pertanian tumbuh dengan laju 4% per tahun dan pada tahun 1990 – 1997 turun menjadi 2%. Tolok ukur kemajuan ekonomi, meliputi pendapatan nasional, tingkat kesempatan kerja , tingkat harga dan posisi pembayaran luar negri (Branson, WN,1989). Perkembangan terakhir pembangunan pertanian dan pedesaan menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap merupakan sumber penting pertumbuhan ekonomi nasional. Kenyataan ini menjadi semakin besar urgensinya mengingat krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia yang disebabkan oleh lumpuhnya pembangunan sektor formal di

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Arti Penting Sektor Pertanian bagi Perekonomian Indonesia

Sektor pertanian di Indonesia masih dianggap penting bagi perekonomian Indonesia. Pentingnya sektor pertanian terhadap perekonomian Indonesia ini dapat dilihat dari aspek: penyediaan pangan, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, dan sumbangannya terhadap perolehan devisa negara melalui ekspor. Oleh karena itu wajar kalau biaya pembangunan untuk sektor pertanian ini selalu tiga besar diantara pembiayaan sektor-sektor yang lain. Dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP-I), sektor pertanian ini bahkan dikatakan sebagai sektor yang tangguh karena memang terbukti bahwa sektor pertanian telah mampu untuk:

a. Penghasil bahan pangan dan bahkan sejak tahun 1984 Indonesia mampu berswasembada beras.
b. Penyedia lapangan kerja bahkan kini sektor pertanian masih menampung 49,3% dari jumlah angkatan kerja yang ada.
c. Pendorong munculnya kesempatan berusaha dan bahkan pesatnya industripun juga sebagian besar berasal dari industri yang berbahan baku pertanian.
d. Penyedia faktor produksi dan bahkan industri hulu seperti industri peralatan pertanian dan pupuk kini berkembang pesat karena berkembangnya sektor pertanian ini. (Soekartawi, 2002)

Hampir semua NSB mengandalkan sektor pertanian mereka untuk kebutuhan Negara mereka. Tentu saja ada perkecualian, misalnya Malaysia atau Saudi Arabia. Kedua Negara ini, yang kaya akan sumberdaya alam untuk ekspor (timah dan minyak) mempunyai cadangan devisa yang banyak untuk mengimpor kebutuhan-kebutuhan pangan mereka. Para petani di NSB tidak hanya berproduksi untuk kebutuhan mereka saja, mereka juga berproduksi untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan. Jika pangsa penduduk perkotaan terhadap penduduk keseluruhan meningkat, maka produktivitas para petani pun harus meningkat.

Sektor pertanian juga merupakan sumber modal yang utama bagi pertumbuhan ekonomi moderen. Modal berasal dari tabungan yang diinvestasikan dan tabungan berasal dari pendapatan. Di Negara-negara yang paling miskin, pangsa pendapatan pertanian terhadap produk nasional mencapai 50 persen. Berarti separuh atau lebih dari produk nasional disumbangkan oleh sector nonpertanian, terutama industri dan perdagangan (jasa-jasa). Dan sektor-sektor ini merupakan penyumbang penting bagi tabungan yang akhirnya digunakan untuk investasi. Namun demikian, bisa saja suatu Negara mengalami tingkat pembentukan modal yang tinggi tanpa didorong oleh sektor pertanian sama sekali. Korea selatan merupakan contohnya. Negara ini mengalami tingkat pembentukan modal yang sangat tinggi terutama sekali disebabkan oleh adanya bantuan luar negeri pada mulanya, dan akhir-akhir ini disebabkan oleh kenaikan keuntungan yang diperolehnya dari perkembangan sektor industri.

Konsep dasar tentang pertanian sebagai sektor yang paling penting didalam pembangunan ekonomi nasional dapat dilihat dalam peryataan dari *Simatupang* dan *Syafa'at (2000)* sebagai berikut : sektor andalan merupakan tulang punggung (*backbone*) dan mesin pengerak perekonomian (*engine of growth*) sehingga dapat pula disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin (*leading sector*) perekonomian nasional (hal.9). Menurut mereka, ada lima syarat yang harus dilihat sebagai kriteria dalam mengevaluasi pertanian sebagai sektor kunci dalam perekonomian nasional. Kelima syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Strategis, dalam artian esensial dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran dan tujuan daripada pembangunan ekonomi nasional, seperti pertumbuhan ekonomi (PDB) dan kesempatan kerja, peningkatan devisa Negara, pembangunan ekonomi daerah, dan sebagainya.
2. Tangguh, yang berarti unggul dalam persaingan baik di dalam negeri maupun di pasar global dan mampu menghadapi gejolak ekonomi, politik, maupun alam. Pertanian sebagai sektor andalan harus memiliki keunggulan kompetitif, berbasis pada kemampuan sendiri (domestik) atau kemandirian dan dapat menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan strategis (sosial, ekonomi, politik, alam).
3. Artikulatif, yang artinya pertanian sebagai sektor andalan harus memiliki kemampuan besar sebagai dinamisator dan fasilisator bagi pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi lainnya dalam suatu spektrum yang luas.

4. Progresif, yang berarti pertanian dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa menimbulkan efek-efek negative terhadap kualitas lingkungan hidup. Hanya jika output pertanian tumbuh positif dan berkelanjutan, sektor tersebut dapat berfungsi sebagai motor pertumbuhan bagi perekonomian nasional.
5. Responsif, dalam arti pertanian sebagai sektor andalan mampu memberi respons yang cepat dan besar terhadap setiap kebijaksanaan pemerintah

4.2. Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang

Pembangunan seimbang itu diartikan pula sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai sektor, misalnya industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik, dan antara sektor produktif dan sektor prasarana. Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan – hambatan dalam: (i) memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar, dan (ii) memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan diproduksikan.

Sementara itu analisa Lewis (dalam Arsyad, 1992 : 257-259), menunjukkan bahwa perlunya pembangunan seimbang yang ditekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian dan sektor industri. Menurut Lewis, akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor

akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan terhambat.

Lewis, menggunakan gambaran dibawah ini untuk menunjukkan pentingnya upaya pembangunan yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Misalnya di sektor pertanian terjadi invasi dalam teknologi produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik, implikasinya yang mungkin timbul adalah : (i) terdapat surplus di sektor pertanian yang dapat dijual ke sektor non pertanian, (ii) produksi tidak bertambah berarti tenaga kerja yang digunakan bertambah sedikit dan jumlah pengangguran tinggi, dan (iii) kombinasi dari kedua keadaan tersebut.

Jika saja industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor-sektor tersebut akan dapat menyerap kelebihan produksi bahan pangan maupun kelebihan tenaga kerja. Tetapi tanpa adanya perkembangan di sektor industri, maka nilai tukar (*Term of Trade*) sektor pertanian akan memburuk sebagai akibat dari kelebihan produksi tenaga kerja, dan akan menimbulkan akibat yang depresif terhadap pendapatan di sektor pertanian. Oleh sebab itu di sektor pertanian tidak terdapat lagi perangsang untuk mengadakan investasi baru dan melakukan inovasi.

Jika pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian maka akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Masalah kekurangan barang pertanian akan terjadi dan akan mengakibatkan kenaikan barang-barang tersebut. Jika sektor pertanian tidak berkembang, maka sektor industri juga tidak

berkembang, dan keuntungan sektor industri hanya merupakan bagian yang kecil saja dari pendapatan nasional. Oleh karenanya tabungan maupun investasi tingkatnya akan tetap rendah. Berdasarkan pada masalah-masalah yang mungkin akan timbul jika pembangunan hanya ditekankan pada salah satu sektor pertanian saja, maka Lewis menyimpulkan bahwa pembangunan haruslah dilakukan secara bersamaan di kedua sektor tersebut.

Hirschman dan Streeten (dalam Arsyad, 1992: 262 – 270) mengemukakan teori pembangunan tidak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat proses pembangunan di negara sedang berkembang. Pola pembangunan tidak seimbang ini, menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut: (i) secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang, (ii) untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia, dan (iii) pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam proses pembangunan yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya. Dengan demikian pembangunan tidak seimbang akan mempercepat pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang. Persoalan pokok yang dianalisis Hirschman dalam teori pembangunan tidak seimbang adalah bagaimana untuk menentukan proyek yang harus didahulukan pembangunannya, dimana proyek-proyek tersebut memerlukan modal dan sumber daya yang tersedia, agar penggunaan berbagai sumber daya yang tersedia tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Cara pengalokasian sumber daya tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu cara pilihan pengganti (*substitution choice*) dan cara pilihan penundaan (*postpoinment*

choice). Cara yang pertama merupakan suatu cara pemilihan proyek yang bertujuan untuk menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus dilaksanakan. Sedangkan cara yang kedua merupakan suatu cara pemilihan yang menentukan urutan proyek yang akan dilaksanakan yaitu menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus didahulukan.

Berdasarkan prinsip pemilihan proyek di atas, Hirschman menganalisis masalah alokasi sumber daya antara sektor prasarana atau *Social Overhead Capital* (SOC) dengan sektor produktif yang langsung menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat atau *Directly Productive Activities* (DPA). Ada 3 (tiga) cara pendekatan yang mungkin dilakukan dalam mengembangkan sektor prasarana dan sektor produktif, yaitu: (i) pembangunan seimbang antara kedua sektor tersebut, (ii) pembangunan tidak seimbang, dimana pembangunan sektor prasarana lebih ditekankan, dan (iii) pembangunan tidak seimbang, dimana sektor produktif lebih ditekankan. Kegiatan ekonomi akan mencapai efisiensi yang optimal jika (i) sumber-sumber daya dialokasikan antara sektor DPA dan sektor SOC sedemikian rupa sehingga dengan sumber daya sejumlah tertentu bisa dicapai tingkat produksi yang maksimum, (ii) untuk suatu tingkat produksi tertentu, jumlah seluruh sumber daya yang digunakan di sektor DPA dan sektor SOC jumlahnya minimum. Di kebanyakan negara sedang berkembang, program pembangunan sering lebih ditekankan pada pembangunan prasarana untuk mempercepat pembangunan sektor produktif.

4.3. Investasi dan Penentuan Tingkat Upah

Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada 2 (dua) tujuan utama yaitu mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada.

Gambaran perkembangan pembangunan daerah secara makro sektoral tidak lepas dari perkembangan distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Dalam kaitan itu perlu dipisahkan jenis investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah, mengingat faktor yang menentukan lokasi kedua jenis investasi tersebut tidak selalu sama. Umumnya pemerintah masih harus memperhatikan beberapa faktor, seperti pengembangan suatu daerah tertentu karena alasan politis dan strategis, misalnya daerah perbatasan dan daerah yang mempunyai sejarah serta ciri khusus, sehingga memerlukan perhatian yang khusus pula.

Usaha pemerataan pembangunan antar daerah juga merupakan faktor lain yang diperhitungkan pemerintah. Pihak swasta tidak berurusan secara khusus dengan faktor-faktor tersebut. Kalaupun ada keterkaitannya, sifatnya tidak langsung, yaitu melalui berbagai peraturan (Azis, 1985 : 15).

Faktor produksi sering diklasifikasikan menjadi empat, yaitu tanah, tenaga kerja, modal dan kewirausahaan. Pengklasifikasian terhadap keempat faktor produksi tersebut didasarkan atas perbedaan elastisitas penawaran parsial, karakeristik yang terkandung pada setiap faktor produksi, dan imbalan yang diterima masing-masing pemilik faktor produki. Secara historis, pembedaan ini bersesuaian dengan berkembangnya *bergaining position* antara tiga kelompok masyarakat, kapitalis, tuan-tuan tanah dan buruh (tenaga kerja). Kekuatan pasarlah yang kemudian menentukan berapa besar imbalan yang akan diterima masing-masing. Tenaga kerja akan mendapatkan upah, tuan tanah mendapatkan sewa tanah, pemilik modal mendapatkan tingkat bunga.

Pandangan ekonomi kapitalis terhadap tenaga kerja tidak terlepas dari konsep faktor produksi atau input. Perkembangan iklim usaha menuntut adanya penyesuaian perlakuan terhadap tenaga kerja. Pada awalnya ada kecenderungan tenaga kerja dianggap sebagai suatu faktor produski lainnya yang memberikan kontribusi relatif tetap terhadap produski. Pandangan ini yang menghasilkan sistem pengupahan tetap terhadap tenaga kerja sebagaimana input tanah mendapatakan sewa tetap dan modal mendapatkan bunga. Adanya ketidakstabilan sifat dan karakter tenaga kerja, mendorong perusahaan untuk memberikan perlakuan lain terhadap tenaga kerja. Jika tanah dan modal dapat diperjualbelikan di pasar sedangkan tenaga kerja tidak demikian. Namun demikian, hal ini tidak cukup menjadikan alasan bagi aliran ekonomi utama (*mainstream economy*) untuk melakukan pembedaan analisis terhadap faktor produksi lain.

Jika kemudian tenaga kerja dibedakan dengan *entrepreneur* (wirausaha) adalah lebih didasarkan atas perbedaan karakter intrinsik yang ada pada kedua faktor produksi tersebut. *Entrepreneur* dipandang sebagai tenaga kerja yang berani mengambil resiko, sehingga ia berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan resiko yang diambil dan nilainya belum tentu tetap.

Tenaga kerja dipandang sebagai suatu faktor produksi yang mampu untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya (mengolah tanah, memanfaatkan modal, dsb) sehingga perusahaan memandang tenaga kerja sebagai suatu investasi dan banyak perusahaan yang memberikan pendidikan kepada karyawannya sebagai wujud kapitalisasi tenaga kerja.

4.4. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Pandangan *mainstream economy* terhadap permintaan tenaga kerja adalah sebagaimana permintaan terhadap faktor produksinya, dianggap sebagai permintaan turunan (*derived demand*), yaitu penurunan dari fungsi perusahaan. Meskipun fungsi perusahaan cukup bervariasi, meliputi memaksimumkan keuntungan, memaksimumkan penjualan atau perilaku untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, namun maksimisasi keuntungan sering dijadikan dasar analisis dalam menentukan penggunaan tenaga kerja.

Dengan pertimbangan tersebut (maksimisasi keuntungan), dan dengan asumsi perusahaan beroperasi dalam sistem pasar persaingan, maka perusahaan cenderung untuk mempekerjakan tenaga kerja dengan tingkat upah sama dengan nilai produk marginal tenaga kerja (*Value Marginal Product of Labor*, VMPL)

VMPL menunjukkan tingkat upah maskimum yang mau dibayarkan oleh perusahaan agar keuntungan perusahaan maksimum.

Analisis tradisonal terhadap penawaran tenaga kerja sering didasarkan atas mengalokasikan waktunya, yaitu antara waktu kerja dan waktu nonkerja (*leisure*). *Leisure* dalam hal ini meliputi segala kegiatan yang tidak mendatangakan pendapatan secara langsung, seperti istrirahat, merawat anak-anak, bersekolah, dan sebagainya. Pilihan tenaga kerja dalam mengalokasikan waktu dari dua jenis kegiatan ini yang akan menempatkan berapa tingkat imbalan (upah) yang diharapkan oleh tenaga kerja. Preferensi subyektif seseorang yang akan menentukan berapa besar jam kerja optimal yang ditawarkan dan tingkat upah yang diharapkan.

Ekonom memandang bahwa *leisure* merupakan kebutuhan pokok manusia, sementara upah juga merupakan barang normal (semakin banyak semakin disukai). Tenaga kerja dianggap tidak suka pada jam bekerja namun suka pada pendapatan dan *leisure*. Oleh karena itu penawaran tenaga kerja berhubungan positif dengan tingkat upah, namun karena *leisure* juga diinginkan oleh tenaga kerja, maka penawaran tenaga kerja bersifat *backward bending* (bengkok ke belakang). Pada tingkat upahnya meningkat karena ingin mempertahankan jam *leisure*-nya (untuk mengurusi keluarga dan sebagainya).

4.5. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja

Manusia sebagai salah satu faktor terpenting dalam proses produksi, maka dapat dikatakan kesempatan kerja akan meningkat jika output meningkat. Hubungan antara kesempatan kerja dan output dapat dilihat berdasarkan rasio

kesempatan kerja - output dan angka elastisitas kesempatan kerja. Model-model pertumbuhan output dan kesempatan kerja terbagi dua yaitu pertumbuhan output dengan kesempatan kerja yang bertentangan, dan yang saling mendukung. Model yang saling bertentangan disebabkan oleh karena output maksimum tercipta oleh adanya industri yang padat modal, sedangkan untuk yang saling mendukung dapat diilustrasikan dalam skema berikut:

Alasan kesempatan kerja ↑ → *pendapatan* ↑ → *permintaan barang konsumsi* ↑ → *memerlukan industri yang padat karya sehingga kesempatan kerja* ↑

4.6. Teori-teori Pertumbuhan.

4.6.1 Teori Klasik

Pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur berdasarkan dari jumlah produksi barang dan jasa (output) yang dihasilkan. Angka yang biasanya digunakan untuk mengukur jumlah output yang dihasilkan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang diukur dengan harga konstan dimana pengaruh perubahan harga telah dihilangkan. Tujuan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi ini adalah untuk melihat kondisi perekonomian. Ukuran baik buruknya dapat dilihat dari struktur produksi (sektoral) atau daerah asal produksi (regional). Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana diukur dengan PDB per kapita, kesempatan kerja yang tersedia dimana semakin besar jumlah output yang dihasilkan maka akan memperluas kesempatan kerja yang ada, perbaikan distribusi pendapatan dimana pertumbuhan ekonomi akan memperluas

kesempatan kerja dan meningkatkan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi sebagai pijakan untuk tahap kemajuan ekonomi selanjutnya.

Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi menurut aliran klasik dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$\mathbf{Q = f (K, L, T, U, M, W, I)}$$

Dimana:

Q = *Output atau PDB*

K = *Barang Modal*

L = *Tenaga Kerja*

T = *Teknologi*

U = *Uang*

M = *Manajemen*

W = *Kewirausahaan (Entrepreneurship)*

I = *Informasi*

salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi yang disebutkan adalah faktor tenaga kerja. Sampai saat ini, terutama di negara-negara berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Peningkatan jumlah tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Hal ini sangat bergantung pada seberapa cepat terjadinya *The Law of Deminishing Return* (TLDR). Sedangkan cepat atau lambatnya proses TLDR tersebut dipengaruhi oleh kualitas tenaga kerja dan keterkaitannya dengan teknologi produksi. Sayangnya, jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam

proses produksi akan semakin berkurang seiring dengan kemajuan teknologi produksi. Sehingga akan muncul trade-off antara efisiensi-produktivitas dan kesempatan kerja. Harga dari efisiensi dan produktivitas dengan menggunakan teknologi padat modal ialah semakin sempitnya kesempatan kerja yang tersedia. (Rahardja dan Manurung, 2001).

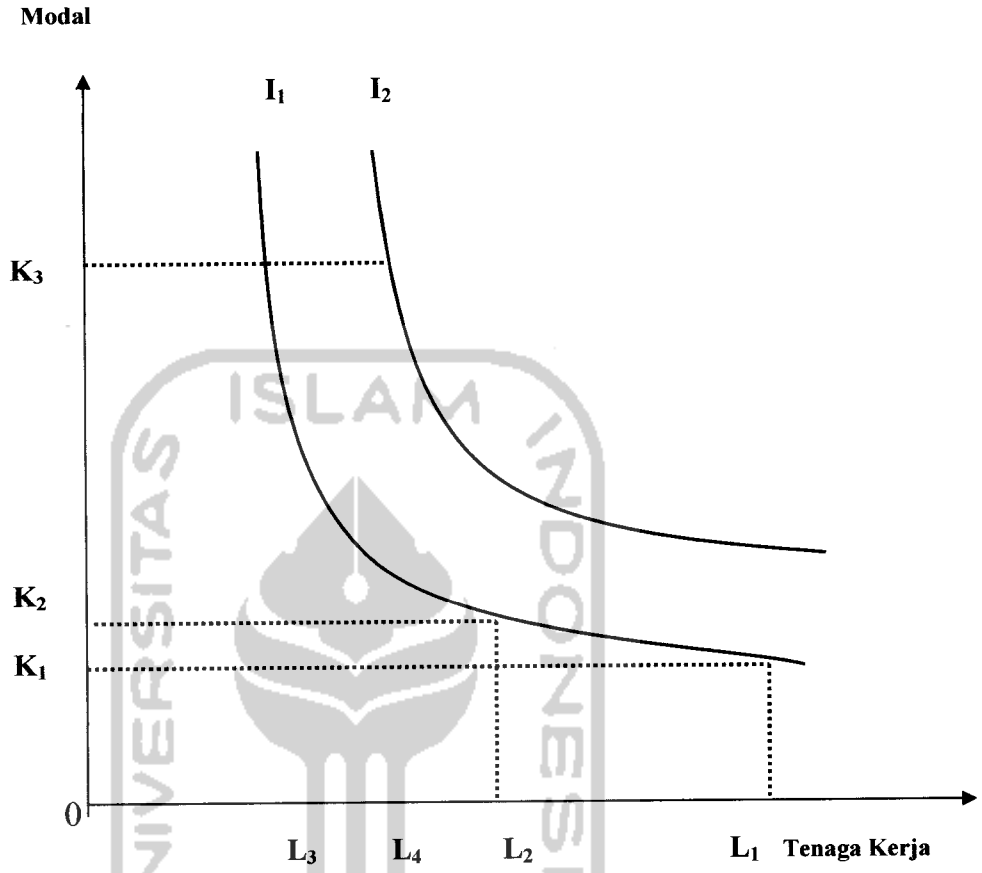
4.6.2. Teori Neo Klasik (Solow-Swan)

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini berdasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis Klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. (Arsyad, 1997 : 57). Selanjutnya menurut teori ini, rasio modal output (capital output ratio = COR) bisa berubah. Dengan kata lain untuk menciptakan sejumlah output tertentu, bisa digunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda pula, sesuai dengan yang dibutuhkan.

Sifat teori pertumbuhan Neo Klasik bisa digambarkan seperti pada gambar 4.1. fungsi produksinya ditunjukan oleh I_1, I_2 dan seterusnya. Dalam fungsi produksi yang berbentuk demikian, suatu tingkat output tertentu dapat diciptakan dengan mengggunakan berbagai kombinasi modal dan tenaga kerja.

Gambar 4.1

Fungsi Produksi Neo Klasik

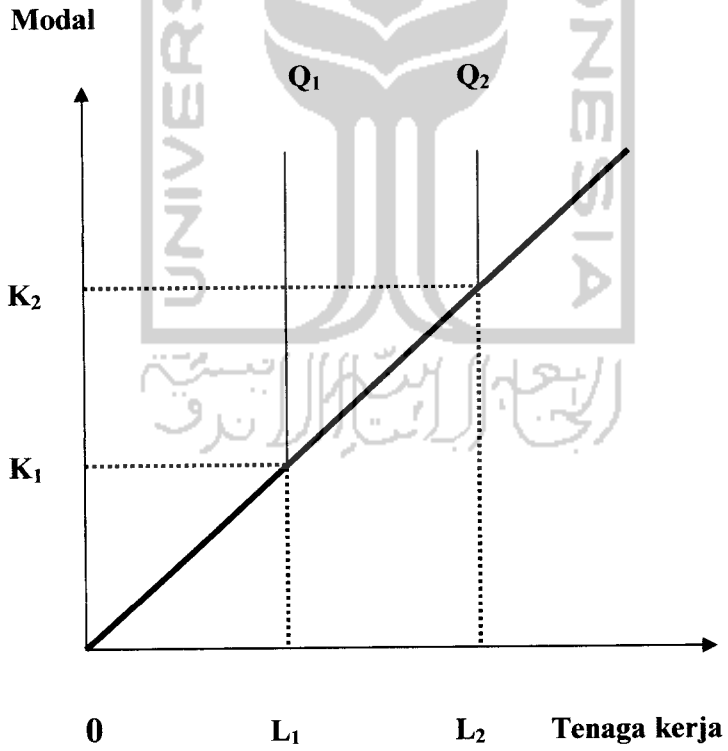


4.6.3. Teori Harrod-Domar

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menggangap bahwa ada hubungan ekonomis secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output totat (Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk

menghasilkan (kenaikan) output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio-output tersebut. Dalam teori ini, fungsi produksi berbentuk L karena sejumlah modal hanya dapat menciptakan suatu output tertentu (modal dan tenaga kerja tidak produktif). Untuk menghasilkan output sebesar Q_1 diperlukan modal K_1 dan tenaga L_1, dan apabila kombinasi itu berubah maka tingkat output berubah. Untuk output sebesar Q_2, misalnya hanya dapat diciptakan jika stok modal sebesar K_2, sifat teori ini bisa digambarkan seperti pada gambar 4.2. (Arsyad, 1997).

Gambar 4.2
Fungsi Produksi Harrod-Domar



4.6.4. Teori Schumpeter

Schumpeter berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan karena kewirausahaan pada pengusaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang disebabkan pengusaha sebagai kemampuan dan keberanian mengaplikasikan penemuan-penemuan baru atau inovator. (Rahardja dan Manurung, 2001). Dalam hal ini, peranan inovator bukan kepada kapitalis melainkan pengusaha yang tidak sekedar memiliki kemampuan manajerial biasa melainkan dapat mmperkenalkan sesuatu yang benar-benar baru (Jhingan, 1990). Sekalipun demikian banyak kritik yang dilontarkan kepada Schumpeter karena anilisisnya yang berbau provokatif mengenai peralihan dari kapitalisme ke sosialis. Di samping itu ada kritik yang juga gencar dilontarkan kepadanya, bahwa dalam memulai proses pembangunan dan mampu untuk berdiri sendiri, yang diperlukan bukan hanya inovasi saja tetapi kombinasi dari beberapa faktor seperti struktur organisasi, praktek bisnis, tenaga yang terampil dan nilai-nilai serta sikap yang tepat. Dalam prakteknya di negara-negara berkembang, menurut Wallich (dalam Jhingan, 1990) tidak pada inovasi, tetapi asimilisasi atas inovasi yang ada. Karena pengusaha di negara yang belum berkembang tidak berada pada posisi berinovasi, malahan mereka mengambil inovasi yang terjadi di negara-negara maju. (Arsyad, 1997).

4.7. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Investasi adalah pengeluaran yang disediakan untuk meningkatkan atau mempertahankan barang-barang modal. Barang atau stok modal terdiri dari pabrik, mesin dan produk-produk tahan lama lainnya yang digunakan untuk proses produksi. Investasi juga dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dimasa yang akan datang. Ada kalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang telah lama aus dan perlu didepresiasikan.

Dalam prakteknya, Usaha untuk mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam satu tahun tertentu yang digolongkan sebagai investasi (pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran atau perbelanjaan.

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan.
2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan lainnya.

3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun perhitungan Pendapatan Nasional.

Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan investasi bruto. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai depresiasi maka akan didapat investasi netto. Investasi netto bertujuan untuk memperbesar kemampuan perusahaan (dari perekonomian secara keseluruhan) untuk memoroduksi barang (mempertinggi kapasitas produksi).

Tujuan investasi yang dilakukan para penanam modal berbeda dengan yang dilakukan oleh para konsumen (rumah tangga), yang membelanjakan sebagian besar pendapatannya untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan, tetapi penanam modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi untuk mencari keuntungan. Dengan demikian banyaknya keuntungan yang akan dipeoleh besar sekali peranannya dalam menentukan investasi yang dilakukan para pengusaha.

4.7.1. Kebijakan Pemerintah dibidang Investasi

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan investasi dengan cara menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dan memberi kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada dunia usaha. Dalam laporan tahunan, kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi lebih dititikberatkan kepada penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan dan fasilitas. Dalam prosedur perijinan baru, beberapa persyaratan penanam modal telah dihapuskan antara lain : bukti kewarganegaraan bagi keturunan asing, jaminan

pemasaran ekspor dan laporan keuangan yang diperiksa akuntan publik. Disamping itu pemerintah juga melakukan usaha promosi yang lebih efektif.

Sejalan dengan itu seperti yang tercantum dalam uu no. 6 tahun 1968, bahwa kesempatan menanam modal lebih diperluas sehingga dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dimana kesempatan untuk menikmati fasilitas PMDN tidak hanya terbuka untuk perseroan terbatas, tapi juga kepada Badan Hukum lain seperti Koperasi, PT persero, Perusahaan Umum, Perusahaan Daerah, CV, Firma dan Perseorangan.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan pengembangan investasi antara lain sebagai berikut :

a. Keppres no 97/1993 tentang tata cara penanaman modal, sebagai penganti keppres no 93/1992. keputusan ini dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan tata cara perijinan di tingkat daerah yang meliputi lokasi, hak atas tanah IMB dan sebagainya.
b. Keputusan menteri perdagangan no. 311/kp/x/1993, tentang penyederhanaan impor mesin dan barang modal lainnya dalam keadaan bukan baru, dapat dilakukan oleh perusahaan pemakai langsung atau perusahaan pemakai langsung atau perusahaan rekondisi yang telah memperoleh ijin usaha industri.
c. Sk presiden no. 54 tahun 1993, tentang pengurangan Daftar Negative Investasi (DNI) yaitu daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal, secara keseluruhan penguranganya adalah dari 51 bidang usaha menjadi 33 bidang usaha. Pengurangan ini untuk memberikan

kesempatan dan peluang yang lebih besar bagi para penanam modal untuk melakukan investasi.

4.8. Penanaman Modal Asing (PMA)

Untuk membangun suatu perekonomian harus memiliki Social Overhead Capital yaitu proyek-proyek raksasa yang diperlukan untuk memperlancar bisnis dan perdagangan seperti jalan raya, rel kereta api, proyek irigasi dan bendungan, serta sarana kesehatan umum. Semua ini memerlukan investasi yang sangat besar yang cenderung bersifat sekaligus. Tidak ada seorang pun atau perusahaan kecil yang mampu membangun suatu sistem jalan raya. Tidak ada perusahaan yang bisa berharap mendapatkan laba jika dana yang diperlukan tidak mampu disediakan oleh pemerintah. Disinilah manfaat proyek investasi skala besar yang ke semuanya itu berasal dari luar negeri yang dapat menyebar ke seluruh perekonomian.

4.9. Tenaga Kerja

Setiap usaha pertanian yang dilaksanakan pasti memerlukan tenaga kerja. Oleh karena itu dalam analisis ketenagakerjaan dibidang pertanian, penggunaan tenaga kerja dinyatakan oleh besarnya curahan tenaga kerja. Curahan tenaga kerja yang dipakai adalah besarnya tenaga kerja efektif yang dipakai. Tenaga merupakan input yang penting dalam kegiatan produksi, baik itu di bidang pertanian atau bidang lainya. Sehingga penggunaan tenaga kerja itu diharapkan bisa maksimal dan sesuai yang diharapkan.

4.10. Otonomi Daerah

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan (*diskresi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Dengan otonomi, Daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*enginee of growth*). Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek *multiplier* yang besar. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat, karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

4.11. Hubungan variabel independent dengan variabel dependen.

4.11.1. Hubungan antara PMDN terhadap PDB sektor pertanian

Investasi merupakan faktor yang sangat penting dan strategis dalam proses pembangunan ekonomi. Adanya investasi dapat manaikkan kapasitas produksi dan juga pendapatan. Sebagai modal pembangunan investasi hendaknya dilakukan pada proyek-proyek yang dapat diharapkan memberi hasil tertinggi atau investasi pada proyek-proyek yang paling menguntungkan.

4.11.2. Hubungan antara PMA terhadap PDB sektor pertanian

Dengan masuknya investasi dari luar negeri menjadikan perubahan teknologi dan inovasi. Disamping faktor kependudukan, sumberdaya alam dan pembentukan modal yang sangat fundamental. Manfaat lainnya adalah bisa menarik keuntungan dengan mengandalkan pada ketrampilan teknik negara-negara yang lebih maju.

4.11.3. Hubungan antara Tenaga kerja terhadap PDB sektor pertanian

Tenaga kerja merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan berproduksi. Tanpa adanya tenaga kerja, mungkin produksi tidak akan dapat dilakukan. Namun tenaga kerja bukan merupakan satu-satunya faktor berproduksi, masih ada faktor yang lain. Misalnya, sumber daya alam, modal dan teknologi. Faktor-faktor produksi tersebut sangat erat sekali hubungannya. Jika salah satu tidak ada, mungkin kegiatan produksi tdak dapat dilakukan. Oleh karena itu dalam kegiatan ekonomi pemanfaatan faktor-faktor produksi tersebut harus dilakukan dengan semaksimal mungkin, sehingga diperoleh hasil output yang maksimal.

4.11.4. Hubungan antara kebijakan otonomi daerah (Dummy Variabel) terhadap PDB sektor pertanian

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. *Pertama*, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan masalah pembangunan sumber daya manusia (SDM). *Kedua*, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perokonomian daerah. Indonesia sebagai negara agraris yang masih mengandalkan sektor petanian sebagai sektor yang sangat potensial dan mampu memberi kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia.

Dengan desentralisasi setiap daerah artinya masyarakat di daerah yang bersangkutan dapat menetapkan strategi pengembangan ekonomi yang paling sesuai dengan kondisi dan kepentingan mereka. Strategi pembangunan tidak lagi menjadi sebuah rencana dan rancangan yang ditentukan oleh segelintir orang saja tetapi merupakan sebuah gerak bersama yang penuh keragaman. Oleh karena itu dengan adanya otonomi daerah, sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan kontribusinya secara lebih besar bagi lagi terutama kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB atau pendapatan nasional.

4.12. Hipotesis

Agar penelitian tidak menyimpang dari judul, arah dan tujuan penelitian, maka ditarik hipotesa sebagai berikut :

1. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), PMA (Penanaman Modal Asing), tenaga kerja, kebijakan otonomi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.
2. PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia
3. PMA (Penanaman Modal Asing) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.
4. Tenaga kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.
5. Kebijakan otonomi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.

BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Metode Penelitian

5.1.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari variabel dependen yaitu PDB sektor pertanian Indonesia dan variabel independen yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri untuk sektor pertanian di Indonesia, Penanaman Modal Asing untuk sektor pertanian di Indonesia dan Jumlah tenaga kerja disektor pertanian di Indonesia serta variabel dummy yaitu kebijakan otonomi daerah. Data sekunder ini bersumber dari Biro Pusat Statistik Indonesia dan tulisan-tulisan atupun laporan dari lembaga yang berkaitan terhadap masalah Pertanian Indonesia.

5.1.2. Definisi Variabel

a. PDB sektor pertanian Indonesia

Adalah keseluruhan Produk Domestik bruto (PDB) yang dihasilkan dari sektor pertanian. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk Milliar Rp per tahun.

b. Penanaman Modal Dalam Negeri untuk sektor pertanian di Indonesia

Adalah keseluruhan Penanaman Modal Dalam Negeri yang diinvestasikan pada sektor pertanian. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk Milliar Rp per tahun.

c. Penanaman Modal Asing untuk sektor pertanian di Indonesia

Adalah keseluruhan Penanaman Modal Asing yang diinvestasikan pada sektor pertanian. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk Juta US$ per tahun.

d. Jumlah tenaga kerja disektor pertanian

Adalah keseluruhan Jumlah Tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian. Data operasional yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan perhitungan tahunan dan dinyatakan dalam bentuk Ribu per tahun.

5.2. Metode Analisis Data

5.2.1. Metode Regresi Kuadrat Terkecil

Analisis data yang dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat Terkecil/OLS *(ordinary least square)*, dengan fungsi PDB sektor Pertanian Indonesia = f (Penanaman Modal Dalam Negeri untuk sektor pertanian, Penanaman Modal Asing untuk sektor pertanian, Jumlah Tenaga Kerja dan Otonomi Daerah), maka persamaan regresi liniernya adalah :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Dm + e$$

Keterangan:

Y = PDB sektor pertanian indonesia (Milliar Rp)

X_1 = PMDN untuk sektor pertanian (Milliar Rp)

X_2 = PMA untuk sektor pertanian (Juta US$)

X_3 = Jumlah Tenaga Kerja sektor pertanian (Orang)

Dm = Dummy variabel untuk melihat pengaruh adanya otonomi daerah terhadap PDB sektor pertanian.

Dm = 0, sebelum adanya kebijakan otonomi daerah

Dm = 1, sesudah adanya kebijakan otonomi daerah.

β_0 = Konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ = Koefisien regresi

e = Kesalahan pengganggu

5.2.2. Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi ini menggunakan uji *Mackinnon, White and Davidson* (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan di gunakan berbentuk linier atau log linier.

Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut :

- Linier → $Y = \beta_o + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Dm + e$
- Log Linier → $\ln Y = \alpha_o + \alpha_1 X_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 \ln X_3 + \alpha_4 Dm + e$

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa

Ho : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

H1 : Y adalah fungsi log linier dari varibel independen X (model log linier)

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut :

1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (*fitted value*) dan selanjutnya dinamai F_1.
2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan selanjutnya dinamai F_2.
3. Dapatkan nilai $Z_1 = \ln F_1 - F_2$ dan $Z_2 = \text{antilog } F_2 - F_1$
4. Estimasi persamaan berikut ini :

$$Y = \beta_o + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Dm + e$$

Jika Z_1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nul dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul dan model yang tepat digunakan adalah model linier

5. Estimasi persamaan berikut :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln x_1 + \alpha_2 \ln x_2 + \alpha 3 \ln x_3 + \alpha_4 Dm + \alpha_5 z_2 + e$$

Jika Z_2 signifikan secara statistik malalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model linier. (Agus Widarjono ; 2005)

5.2.3. Uji Statistik

Selanjutnya untuk mengetahui keakuratan data maka perlu dilakukan beberapa pengujian : (Gujarati ; 1999)

a. Uji t Statistik

Uji t statistik melihat hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

1. Hipotesis yang digunakan :

a. Jika Hipotesis positif

Ho : $\beta i \leq 0$ ➔ Tidak ada pengaruh antara variabel dependen dan independent.

Ha : $\beta i > 0$ ➔ ada pengaruh variabel dependen dan independen.

b. Jika Hipotesis negatif

Ho : $\beta i \geq 0$ ➔ Tidak ada pengaruh antara variabel dependen dan independen.

Ha : $\beta i < 0$ ➔ ada pengaruh variabel dependen dan independen.

2. Pengujian satu sisi

Jika T tabel ≥ t hitung, Ho diterima berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Jika T tabel < t hitung, Ho ditolak berarti variabel independen secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji F statistik

Pengujian ini akan memperlihatkan hubungan atau pengaruh antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, yaitu dengan cara sebagai berikut :

Ho : $\beta i = 0$, maka variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel independen.

Ha : $\beta i \neq 0$, maka variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen.

Hasil pengujian adalah :

Ho diterima (tidak signifikan) jika F hitung < F tabel (df = n–k)

Ho ditolak (signifikan) jika F hitung > F tabel (df = n – k)

Dimana :

K : Jumlah variabel

N : Jumlah pengamatan

c. Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 menjelaskan seberapa besar persentasi total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R^2 semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen.

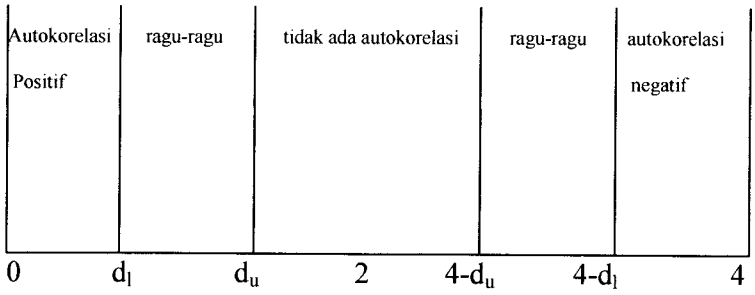
Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 , suatu R^2 sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

5.2.4. Pengujian asumsi klasik

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah model yang diteliti akan mengalami penyimpangan asumsi klasik atau tidak, maka pengadaan pemeriksaan terhadap penyimpangan asumsi klasik tersebut harus dilakukan :

a. Autokorelasi

Adalah keadaan dimana faktor-faktor pengganggu yang satu dengan yang lain saling berhubungan, pengujian terhadap gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji *Durbin-Watson (DW),* yaitu dengan cara membandingkan antara DW statistik (d) dengan d_L dan d_U, jika DW statistik berada diantara d_U dan 4- d_U maka tidak ada autokorelasi.



Gambar 5.1. Statistik Durbin-Watson

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan jelas dalam gambar 5.2 berikut ini :

Tabel 5.1. Uji Statistik Durbin-Watson

Nilai Statistik	Hasil
0<d<dl	Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi positif
dl≤d≤du	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
du≤d≤4-du	Menerima hipotesis nul; tidak ada autokorelasi positif/negatif
4-du≤d≤4-dl	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
4-dl≤d≤4	Menolak hipotesis nul; ada autokorelasi negatif

(Agus Widarjono; 2005)

Atau dengan cara lain untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model bisa dilakukan menggunakan uji LM atau *Lagrange Multiplier*. Salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi tersebut adalah dengan memasukkan

lag variabel dependen kedalam model regresi. Misalnya pada model regresi :

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \beta_4 Dm + e$

yang diyakini terdapat autokorelasi, untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi dalam model regresi tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan *lag* variabel dependen (Y) ke dalam model sehingga model regresi tersebut menjadi:

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4 Dm + b_5Y_{(t-1)}$. (Gujarati ; 1999)

b. Multikolinearitas

Adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen, pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi parsial, (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2) regresi awal atau yang disebut dengan metode *Klein rule of Thumbs*. Jika $r^2 < R^2$ maka tidak ada multikolineraitas.

(Gujarati ; 1999)

c. Heteroskedastisitas

Adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama, pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara uji *gletser,*

BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1. Analisis Hasil Regresi dan Pengujian Hipotesis

6.1.1. Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi ini menggunakan uji Mackinnon, white and Davidson (MWD) yang bertujuan untuk menentukan apakah model yang akan di gunakan berbentuk linier atau log linier.

Persamaan matematis untuk model regresi linier dan regresi log linier adalah sebagai berikut :

- Linier → $Y = \beta_o + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Dm + e$
- Log Linier → $\ln Y = \alpha_o + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 \ln X_3 + \alpha_4 Dm + e$

Untuk melakukan uji MWD ini kita asumsikan bahwa

Ho : Y adalah fungsi linier dari variabel independen X (model linier)

H1 : Y adalah fungsi log linier dari varibel independen X (model log linier)

Adapun prosedur metode MWD adalah sebagai berikut :

1. Estimasi model linier dan dapatkan nilai prediksinya (*fitted value*) dan selanjutnya dinamai F_1.
2. Estimasi model log linier dan dapatkan nilai prediksinya, dan selanjutnya dinamai F_2.
3. Dapatkan nilai $Z_1 = \ln F_1 - F_2$ dan $Z_2 = \text{antilog } F_2 - F_1$
4. Estimasi persamaan berikut ini :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 + \alpha_4 Dm + \alpha_5 z_1 + e$$

Jika Z_1 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis nul dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis nul dan model yang tepat digunakan adalah model linier

5. Estimasi persamaan berikut :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 \ln x_1 + \alpha_2 \ln x_2 + \alpha 3 \ln x_3 + \alpha_4 Dm + \alpha_5 z_2 + e$$

Jika Z_2 signifikan secara statistik melalui uji t maka kita menolak hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model log linier dan sebaliknya jika tidak signifikan maka kita menerima hipotesis alternatif dan model yang tepat untuk digunakan adalah model linier.

Adapun aplikasi metode MWD dalam kasus regresi PDB sektor pertanian di Indonesia pada periode 1986 sampai dengan 2003. Dimana PMDN, sektor pertanian, PMA sektor pertanian dan jumlah tenaga kerja, merupakan variabel independen, serta kebijakan otonomi daerah sebagai variabel dummy sehingga kita mempunyai persamaan sebagai berikut :

- Linier ➔ $Y = \beta_o + \beta_1 X1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_3 + \beta_4 Dm + e$
- Log Linier ➔ $\ln Y = \alpha_o + \alpha_1 \ln X_1 + \alpha_2 \ln X_2 + \alpha_3 \ln X_3 + \alpha_4 Dm + e$

Y = PDB sektor pertanian; X1 = PMDN sektor pertanian ; X2 = PMA sektor pertanian ; X3 = Jumlah tenaga kerja sektor pertanian ; Dm = Kebijakan otonomi daerah dan e adalah residual masing-masing model regresi.

Hasil estimasi masing-masing model adalah sebagai berikut:

- *Hasil regresi linier*

$Y = 47263,51 + 1,256905X_1 + 209,3376X_2 - 247,0261X_3 + 20451,25Dm$

t-hitung = (0,996203) (2,230939) (2,555316) (-0,214548) (4,082351)

$R^2 = 0,682103$

- *Hasil regresi log-linier*

$Y = 11,05034 + 0,128975\ln X1 + 0,168659\ln X2 - 0,505842\ln X3 + 0,376576Dm$

t-hitung = (3,232717) (1,865421) (2,597936) (-0,586652) (3,203883)

$R^2 = 0,653264$

Hasil kedua regresi menunjukan bahwa model fungsi linier bisa digunakan untuk meregresi sedangkan log linear juga bisa digunakan untuk menjelaskan tentang PDB sektor pertanian di Indonesia.

Untuk memutuskan bentuk model dengan metode MWD kita harus menjalankan langkah nomor 1 sampai 3. Adapun langkah ke 4 metode MWD yakni melakukan regresi sebagaimana persamaan yang terdapat pada prosedur di atas yang menghasilkan informasi persamaan regresi sebagai berikut :

$Y = 47744.99 + 1.257289X_1 + 206.6790X_2 - 256.1963X_3 + 20438.30Dm - 2821,99Z_1$

t-hitung = (0.950703)(2.144151) (2.083915) (-0.211569) (3,915774) (-0,052470)

Prob = (0.3605) (0.0532) (0.0592) (0.8360) (0.0021) (0.9590)

$R^2 = 0,682175$

Nilai Probabilitas koefisien Z_1 pada persamaan diatas adalah 0,9590. Dengan demikian variabel Z_1 tidak signifikan secara statistik. Sehingga

hipotesis nul yang menyatakan bahwa model fungsi regresi yang benar adalah bentuk linear diterima. Sedangkan hasil regresi pada langkah 5 mempunyai persamaan sebagai berikut:

$\ln Y = 10.22756 + 0137604\ln X_1 + 0{,}224446\ln X_2 - 0.354349\ln X_3 + 0.115002Dm - 2.43E\text{-}05Z_2$

t-hitung = (3.003330) (3.025007) (2,902387) (-0.416082) (3.318410) (-1.263257)

Prob = (0.0110) (0.0657) (0.0133) (0.6847) (0.0061) (0.2305)

R^2 = 0.693962

Nilai Probabilitas koefisien Z_2 pada persamaan diatas adalah 0,2305. Dengan demikian variabel Z_2 tidak signifikan secara statistik. Sehingga hipotesis nul yang menyatakan bahwa model fungsi regresi yang benar adalah bentuk log linear diterima. Hasil kedua regresi menunjukan bahwa model fungsi linier maupun log linear bisa digunakan untuk menjelaskan tentang PDB sektor pertanian di Indonesia.

6.1.2. Hasil Regresi

Analisis hasil regresi ini menggunakan alat bantu yaitu program komputer Eviews. Hasil regresi log linier berganda yang di dapat adalah sebagai berikut :

$Y = 11{,}05034 + 0{,}128975\ln X1 + 0{,}168659\ln X2 - 0{,}505842\ln X3 + 0{,}376576Dm$

t-hitung = (3,232717) (1,865421) (2,597936) (-0,586652) (3,203883)

R^2 = 0,653264

Adjusted R2 = 0,546576

DW Statistik = 1,433769

F-Statistik = 6,123127

6.1.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Perhitungan yang dilakukan untuk mengukur proporsi atau prosentase dari variasi total variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh model regresi. R^2 dalam regresi sebesar 0,653264. Ini berarti variabel PDB sektor pertanian dapat dijelaskan oleh PMDN sektor pertanian, PMA sektor pertanian dan tenaga kerja sektor pertanian serta kebijakan otonomi daerah sebesar 65,3264 persen, sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

6.1.3. Pengujian t-Statistik

Uji t-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian t-statistik dilakukan dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. (Damodar Gujarati, 1995, 74)

$$\text{t-tabel} = \{ \alpha ; df (n-k) \}$$

$$\text{t-hitung} = \frac{bi}{Se(bi)}$$

Keterangan :

α = *Level of significance*, atau probabilitas menolak hipotesis yang benar.

n = Jumlah sampel yang diteliti.

K = Jumlah variabel independen termasuk konstanta.

Se = Standar error.

Uji t-statistik yang dilakukan menggunakan uji satu sisi (*one tail test*), dengan α = 5 %.

Jika t-tabel < t-hitung berarti Ho ditolak atau variabel Xi berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, tetapi jika t-tabel ≥ t-hitung berarti Ho diterima atau variabel Xi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

TABEL 6.1.

HASIL UJI T-STATISTIK

Variabel	Koefisien	t-hitung	t-tabel	Keterangan
X1	1.256905	1.865421	1,771	Signifikan
X2	209.3376	2.597936	1,771	Signifikan
X3	-247.0261	-0.586652	1,771	Tidak Signifikan
Dm	47263.51	3.418282	1,771	Signifikan

1. Uji t-Statistik Variabel PMDN sektor petanian (β_1)

Hipotesis pengaruh variabel X_1 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

- Ho : $b_1 \leq 0$, berarti variabel independen X_1 tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Ha : $b_1 > 0$,berarti variabel independent X_1 berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X_1 =1,865421 sedangkan t-tabel = 1,771 (df (n-k) = 13 ,α = 0,05), sehingga t-hitung < t-tabel (1,865421 > 1,771). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung < t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat

disimpulkan bahwa variabel PMDN sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian.

2. Uji t-Statistik Variabel PMA sektor partanian (β_2)

Hipotesis pengaruh variabel X_2 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

- Ho : $b_2 \geq 0$, berarti variabel independen X_2 tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Ha : $b_2 < 0$, berarti variabel independen X_2 berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung $X_2 = 2{,}36374$, sedangkan t-tabel = 1.771 (df (n-k) = 13 ,$\alpha = 0{,}05$), sehingga t-hitung > t-tabel (2,597936 > 1,771). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PMA sektor pertanian berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian.

3. Uji t- Statistik Variabel Tenaga kerja (β_3)

Hipotesis pengaruh variabel X_3 terhadap variabel dependen yang digunakan adalah : (Uji satu sisi negatif)

- Ho : $b_3 \leq 0$, berarti variabel independen X_3 tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Ha : $b_3 > 0$, berarti variabel independen X_3 berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitungX_3= -0,58665, sedangkan t-tabel = 1,782 (df (n-k) = 13 ,α = 0,05), sehingga t-hitung > t-tabel (-0,586652 > -1,771). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah tenaga kerja sektor pertanian berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDB sektor pertanian.

4. Uji t- Statistik Variabel Dummy kebijakan otonomi daerah (β_4)

Hipotesis pengaruh variabel Dm terhadap variabel dependen yang digunakan adalah :

- Ho : $b_4 \leq 0$, berarti variabel dummy (Dm) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- Ha : $b_4 > 0$, berarti variabel dummy (Dm) berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah t-hitung X_4 =3,418282 sedangkan t-tabel = 1,771 (df (n-k) = 13 ,α = 0,05), sehingga t-hitung > t-tabel (3,418282 > 1,771). Perbandingan antara t-hitung dengan t-tabel, yang menunjukkan bahwa t-hitung > t-tabel, Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dummy kebijakan otonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian.

6.1.4. Pengujian F-Statistik

Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian F-statistik ini dilakukan dengan cara membandingkan antara F-hitung dengan F-tabel. (Damodar Gujarati, 1995, 81)

$$\text{F-hitung} = \frac{R^2/(k-I)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

F-tabel = (α : k-1, n-k) α = 5 %, (5-1= 4 ; 18-4 =14)

Jika F-tabel < F-hitung berarti Ho ditolak atau variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel independen, tetapi jika F-tabel ≥ F-hitung berarti Ho diterima atau variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan adalah :

- Ho : b1 = b2 = b3 = 0, berarti variabel independen secara keseluruhan tidak berpengaruh terhadap variabel independen.
- Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel independen.

Hasil perhitungan yang didapat adalah F-hitung = 6,123127 sedangkan F-tabel =3,11 (α = 0,05 ; 3,11),sehingga F-hitung > F-tabel (6,123127>3,11).

Perbandingan antara F-hitung dengan F-tabel yang menunjukkan bahwa F-hitung > F-tabel, menandakan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sehingga bahwa variabel PMDN sektor pertanian (X_1), PMA sektor pertanian (X_2)

dan Jumlah tenaga kerja sektor pertanian (X_3) serta kebijakan otonomi daerah (Dm) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.

6.2. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini meliputi 3 macam pengujian, yaitu pengujian multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

6.2.1. Multikolinieritas.

Multikolinieritas adalah hubungan yang terjadi diantara variabel-variabel independen atau variabel independen yang satu fungsi dari variabel independen yang lain.

Pengujian terhadap gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien determinasi parsial (r^2) dengan koefisien determinasi majemuk (R^2), jika r^2 lebih kecil dari R^2 maka tidak ada multikolinieritas.

TABEL 6.2.

HASIL PENGUJIAN MULTIKOLINIERITAS

Variabel	r^2	R^2	Keterangan
X_1 dengan X_2	-0.000757	0,653264	Tidak ada multikolinieritas
X_1 dengan X_3	0.020789	0,653264	Tidak ada multikolinieritas
X_1 dengan Dm	0.003811	0,653264	Tidak ada multikolinieritas
X_2 dengan X_3	0.001791	0,653264	Tidak ada multikolinieritas
X_2 dengan Dm	-0.002236	0,653264	Tidak ada multikolinieritas
X_3 dengan Dm	-0.012319	0,653264	Tidak ada multikolinieritas

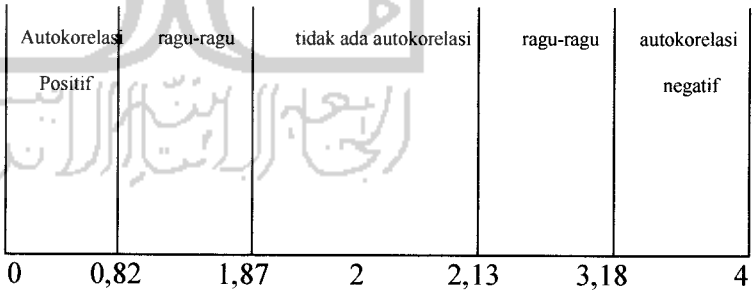
Hasil *correlation matrix* diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolenieritas dimana seluruh nilai r^2 lebih kecil dibandingkan nilai R^2.

6.2.2. Autokorelasi.

Uji ini dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar data dalam satu variabel atau hubungan antar residual dalam sebuah hasil regresi. Uji Durdin-Watson dilakukan dengan cara membandingkan antara DW statistik (d) dengan d_L dan d_U, jika DW statistik berada diantara d_U dan 4-d_U maka tidak ada autokorelasi. Dari hasil regresi diperoleh nilai Dw hitung = 1,4337 dan nilai DW-tabel (α=5%; k=4;n=18) diperoleh dl= 0,82; du=1,87; 4-dl= 2,13; 4-du=3,18.

Gambar 6.1

Uji Durbin-Watson



Hasil pengujian Durbin-Watson dapat kita interprestasikan bahwa d-test :

dl < d test < du ; 0,82 < 1,4337 < 1,87

dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa d-test berada pada daerah keragu-raguan.

6.2.3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan uji gletser, yaitu dengan cara meregresi nilai residu yang telah diabsolutkan dengan variabel independen, apabila t-tabel > t-hitung berarti tidak ada heteroskedastisitas, tetapi jika nilai t-tabel < t-hitung maka terdapat heteroskedastisitas.

TABEL 6.3.

HASIL UJI GLEJSER

Variabel	t-hitung	t-tabel	Keterangan
X1	0.459463	1,771	Tidak ada heterokedastisitas
X2	-1.808538	1,771	Tidak ada heterokedastisitas
X3	-0.034477	1,771	Tidak ada heterokedastisitas
Dm	-1.282812	1,771	Tidak ada heterokedastisitas

Hasil perhitungan dengan uji gletser didapat bahwa semua variabel memiliki t-hitung < t-tabel (1,771) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

6.3. Interpretasi Ekonomi

Hasil analisis dari persamaan regresi :

Y= 11,05034+0,128975lnX1+0,168659lnX2-0,505842lnX3+ 0,376576Dm

Sebelum adanya kebijakan Otonomi daerah :

Y= 11,05034+0,128975lnX1+0,168659lnX2-0,505842lnX3+ 0,376576 (0)

Y= 11,05034+0,128975lnX1+0,168659lnX2-0,505842lnX3

Sesudah adanya kebijakan Otonomi daerah :

Y= 11,05034+0,128975lnX1+0,168659lnX2-0,505842lnX3+ 0,376576 (1)

Y= 11,426916 + 0,128975lnX1+0,168659lnX2-0,505842lnX3

Dapat di interpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta sebesar 11,05034 ini berarti jika seluruh variabel independen yaitu PMDN sektor pertanian Indonesia (X_1), PMA sektor pertanian Indonesia (X_2), dan Jumlah Tenaga kerja (X_3) Serta kebijakan otonomi daerah (Dm) sama dengan nol maka PDB sektor pertanian Indonesia akan naik sebesar 11,05034 persen (sebelum otonomi Daerah)
2. Konstanta sebesar 11,426916 ini berarti jika seluruh variabel independen yaitu PMDN sektor pertanian Indonesia (X_1), PMA sektor pertanian Indonesia (X_2), dan Jumlah Tenaga kerja (X_3) sama dengan nol dan Otonomi Daerah dijalankan (Dm=1) maka PDB sektor pertanian Indonesia akan naik sebesar 11,426916 persen (sesudah otonomi Daerah)
3. Koefisien PMDN sektor pertanian Indonesia sebesar 0,128975 ini berarti setiap kenaikan PMDN sektor pertanian sebesar 1 persen akan menyebabkan PDB sektor pertanian naik sebesar 0,128975 persen.

4. Koefisien PMA sektor pertanian Indonesia sebesar 0,168659 ini berarti setiap kenaikan PMA sektor pertanian Indonesia sebesar 1 persen akan menyebabkan PDB sektor pertanian Indonesia naik sebesar 0,168659 persen.

6.4. Pembahasan Hasil Analisis

Hasil estimasi dan pengujian satu pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan ternyata hasil estimasi PDB sektor pertanian Indonesia tidak terdapat Multikolinieritas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi sehingga hasil dari pengujian tersebut dapat diaplikasikan lebih lanjut.

1. Variabel pertama menyatakan bahwa besar kecilnya PDB sektor pertanian di Indonesia dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel PMDN sektor pertanian, PMA sektor pertanian dan Jumlah tenaga kerja serta Kebijakan otonomi daerah, hal ini dapat dilihat dari pengujian secara serempak yang telah dilakukan yaitu ternyata F-hitung > F-tabel ini berarti secara bersama-sama variabel PMDN sektor pertanian, PMA sektor pertanian dan Jumlah tenaga kerja serta Kebijakan otonomi daerah mempengaruhi PDB sektor pertanian di Indonesia secara signifikan, selain itu dengan melihat besarnya angka determinasi (R^2) = 0,653264 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen tersebut mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 65,32 % dan sisanya dijelaskan oleh variabel di luar model.
2. Variabel PMDN sektor pertanian (X_1) secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia ini

BAB VII

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Simpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel PMDN sektor pertanian Indonesia, PMA sektor pertanian Indonesia dan jumlah tenaga kerja sektor pertanian serta kebijakan otonomi daerah (variabel dummy) terhadap rupiah terhadap PDB sektor pertanian Indonesia kurun waktu tahun 1986 sampai 2003, dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian t-statistik menunjukkan bahwa PMDN sektor pertanian Indonesia mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.
2. PMA sektor pertanian mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.
3. Tenaga kerja mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia. Nilai koefisien dari tenaga kerja bertanda negatif sebesar -0,505842 menunjukkan bahwa adanya penambahan jumlah tenaga kerja tidak berdampak pada peningkatan produksi. Ini berarti penambahan output di sektor pertanian hanya dilakukan dengan cara mengurangi tenaga kerja.
4. Kebijakan Otonomi Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDB sektor pertanian Indonesia.

Suryar

Tambu

Todaro

Daftar Pustaka

Arsyad, Lincolin (1992), *Ekonomi Pembangunan,* Bagian Penerbitan, STIE-YKPN, Yogyakarta.

Bahrul, Elmi (2002), *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Biro Pusat Statistik, (1986-2003), *Statistik Indonesia*,.Jakarta

Basri, Faisal (1997), *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad 21*, Erlangga, Jakarta.

Gujarati ,Damodar (2000), *Econometric*, Erlangga, Jakarta.

Hakim, Abdul (2002), *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Pertama, Ekonosia, Yogyakarta.

Jhingan, M.L. (1990), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Pers, Jakarta.

Hutabarat, Budiman (2001), *Analisis Dampak Investasi Publik Terhadap Sektor Pertanian*, Diambil 1 Oktober 2005, dari http://www.deptan.go.id

Kuncoro, Mudrajad (1997), *Ekonomi Pembangunan : Teori, masalah, dan kebijakan,* UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Martina, Ken (2003), *Dampak transformasi struktur ekonomi terhadap kesempatan kerja dan output*, Diambil 28 September 2005, dari http://www.rudyct.tripod.com

Mankiw, N. Gregory (1999), *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Keempat, Erlangga, Jakarta.

Michael.P. Todaro (2000), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga,* Erlangga, Jakarta.

Mubyarto (1995), *Pengantar Ekonomi Pertanian*, LP3ES, Jakarta

Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala (2001), *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar,* Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta

LAMPIRAN

Lampiran I. Data perkembangan PDB Sektor Pertanian (1986–2003), PMDN Sektor Pertanian, PMA Sektor Pertanian dan Jumlah Tenaga kerja Sektor Pertanian di Indonesia serta Dummy Variabel Kebijakan Otonomi Daerah

obs	Y	X1	X2	X3	DM
1986	30788.48	1492.420	102.2000	37644472	0.000000
1987	35251.21	3553.980	117.4000	38722089	0.000000
1988	38995.78	4744.370	177.4000	40456090	0.000000
1989	43901.74	4369.350	193.5000	41097381	0.000000
1990	46319.66	7027.800	191.6000	42378309	0.000000
1991	48371.93	4939.700	26.00000	41205791	0.000000
1992	51453.09	2485.300	231.4000	42153205	0.000000
1993	55745.50	3092.500	160.1000	40071850	0.000000
1994	59291.20	7401.000	729.8000	37857499	0.000000
1995	61885.20	10097.00	1384.200	35233270	0.000000
1996	63827.80	16071.40	1521.600	37720251	0.000000
1997	64468.00	14807.70	463.7000	35848631	0.000000
1998	63609.50	5315.100	998.2000	39414765	0.000000
1999	64985.30	2408.300	491.2000	38378133	0.000000
2000	66208.40	4137.900	444.1000	40676713	1.000000
2001	67318.50	1378.000	389.7000	39743908	1.000000
2002	68669.80	1453.800	458.9000	40633627	1.000000
2003	70374.40	1929.100	178.9000	42001437	1.000000

Keterangan :

Y = PDB sektor pertanian Indonesia (Milliar Rp)

X1 = PMDN sektor pertanian Indonesia (Milliar Rp)

X2 = PMA sektor pertanian Indonesia (million US$)

X3 = Jumlah tenaga kerja (orang)

Dm = Dummy variabel (kebijakan otonomi daerah)

Lampiran II. Hasil regresi linier

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/12/06 Time: 13:29
Sample: 1986 2003
Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	1.256905	0.563397	2.230939	0.0439
X2	209.3376	81.92240	2.555316	0.0240
X3	-247.0261	1151.378	-0.214548	0.8334
DM	20451.25	5009.675	4.082351	0.0013
C	47263.51	47443.67	0.996203	0.3373

R-squared	0.682103	Mean dependent var	55636.97
Adjusted R-squared	0.584288	S.D. dependent var	12339.47
S.E. of regression	7955.966	Akaike info criterion	21.03136
Sum squared resid	8.23E+08	Schwarz criterion	21.27869
Log likelihood	-184.2823	F-statistic	6.973422
Durbin-Watson stat	1.459413	Prob(F-statistic)	0.003162

Lampiran III. Hasil regresi log-linier

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 03/12/06 Time: 13:39
Sample: 1986 2003
Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.128975	0.069140	1.865421	0.0848
LOG(X2)	0.168659	0.064920	2.597936	0.0221
LOG(X3)	-0.505842	0.862252	-0.586652	0.5675
DM	0.376576	0.117537	3.203883	0.0069
C	11.05034	3.418282	3.232717	0.0065

R-squared	0.653264	Mean dependent var	10.89961
Adjusted R-squared	0.546576	S.D. dependent var	0.248650
S.E. of regression	0.167433	Akaike info criterion	-0.506332
Sum squared resid	0.364440	Schwarz criterion	-0.259006
Log likelihood	9.556984	F-statistic	6.123127
Durbin-Watson stat	1.433769	Prob(F-statistic)	0.005368

Lampiran IV. Hasil regresi log linier yang telah disembuhkan dari penyakit autokorelasi

Test Equation:
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/12/06 Time: 15:52

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	-0.013809	0.076096	-0.181465	0.8593
LOG(X2)	-0.032828	0.075579	-0.434349	0.6724
LOG(X3)	0.654138	1.252981	0.522065	0.6120
DM	-0.043514	0.129921	-0.334929	0.7440
C	-2.167033	4.746022	-0.456600	0.6568

R-squared	0.083388	Mean dependent var	2.37E-15
Adjusted R-squared	-0.416582	S.D. dependent var	0.146416
S.E. of regression	0.174265	Akaike info criterion	-0.371181
Sum squared resid	0.334050	Schwarz criterion	-0.024925
Log likelihood	10.34062	F-statistic	0.166786
Durbin-Watson stat	1.791599	Prob(F-statistic)	0.980577

Lampiran V. Hasil uji MWD dengan model linier

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 03/12/06 Time: 14:29
Sample: 1986 2003
Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	1.257289	0.586381	2.144151	0.0532
X2	206.6790	99.17820	2.083915	0.0592
X3	-256.1963	1210.933	-0.211569	0.8360
DM	20438.30	5219.478	3.915774	0.0021
Z1	-2821.993	53783.27	-0.052470	0.9590
C	47744.99	50220.75	0.950703	0.3605

R-squared	0.682175	Mean dependent var	55636.97
Adjusted R-squared	0.549749	S.D. dependent var	12339.47
S.E. of regression	8279.883	Akaike info criterion	21.14225
Sum squared resid	8.23E+08	Schwarz criterion	21.43904
Log likelihood	-184.2802	F-statistic	5.151336
Durbin-Watson stat	1.463570	Prob(F-statistic)	0.009389

Lampiran VI. Hasil uji MWD dengan model log linier

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 03/12/06 Time: 14:30
Sample: 1986 2003
Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	0.137604	0.067952	2.025007	0.0657
LOG(X2)	0.224446	0.077331	2.902387	0.0133
LOG(X3)	-0.354349	0.851633	-0.416082	0.6847
DM	0.381625	0.115002	3.318410	0.0061
Z2	-2.43E-05	1.93E-05	-1.263257	0.2305
C	10.22756	3.405407	3.003330	0.0110

R-squared	0.693962	Mean dependent var	10.89961
Adjusted R-squared	0.566447	S.D. dependent var	0.248650
S.E. of regression	0.163723	Akaike info criterion	-0.520076
Sum squared resid	0.321664	Schwarz criterion	-0.223286
Log likelihood	10.68069	F-statistic	5.442174
Durbin-Watson stat	1.451149	Prob(F-statistic)	0.007640

Lampiran VII. Hasil uji LM untuk mendeteksi autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.500359	Probability	0.619470
Obs*R-squared	1.500987	Probability	0.472134

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 03/12/06 Time: 15:52

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(X1)	-0.013809	0.076096	-0.181465	0.8593
LOG(X2)	-0.032828	0.075579	-0.434349	0.6724
LOG(X3)	0.654138	1.252981	0.522065	0.6120
DM	-0.043514	0.129921	-0.334929	0.7440
C	-2.167033	4.746022	-0.456600	0.6568
RESID(-1)	0.283902	0.348812	0.813913	0.4330
RESID(-2)	0.287078	0.445199	0.644831	0.5323

R-squared	0.083388	Mean dependent var	2.37E-15
Adjusted R-squared	-0.416582	S.D. dependent var	0.146416
S.E. of regression	0.174265	Akaike info criterion	-0.371181
Sum squared resid	0.334050	Schwarz criterion	-0.024925
Log likelihood	10.34062	F-statistic	0.166786
Durbin-Watson stat	1.791599	Prob(F-statistic)	0.980577

Lampiran VIII. Hasil Uji Glejser untuk mendeteksi heterokedastisitas

Dependent Variable: LOG(ABSRES1)
Method: Least Squares
Date: 03/12/06 Time: 13:54
Sample: 1986 2003
Included observations: 18

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.407754	30.52442	-0.013358	0.9895
LOG(X1)	0.283674	0.617404	0.459463	0.6535
LOG(X2)	-1.048452	0.579723	-1.808538	0.0937
LOG(X3)	-0.265460	7.699701	-0.034477	0.9730
DM	-1.346413	1.049579	-1.282812	0.2220

R-squared	0.402828	Mean dependent var	-2.753193
Adjusted R-squared	0.219083	S.D. dependent var	1.691915
S.E. of regression	1.495137	Akaike info criterion	3.872446
Sum squared resid	29.06067	Schwarz criterion	4.119772
Log likelihood	-29.85202	F-statistic	2.192317
Durbin-Watson stat	1.847109	Prob(F-statistic)	0.126812

Lampiran IX. Correlation Matrix untuk mendeteksi multikolinearitas

	LOG(X1)	LOG(X2)	LOG(X3)	DM	C
LOG(X1)	0.004780	-0.000757	0.020789	0.003811	-0.114541
LOG(X2)	-0.000757	0.004215	0.001791	-0.002236	-0.013576
LOG(X3)	0.020789	0.001791	0.743479	-0.012319	-2.908562
DM	0.003811	-0.002236	-0.012319	0.013815	0.017820
C	-0.114541	-0.013576	-2.908562	0.017820	11.68465

Keterangan :

Y = PDB sektor pertanian Indonesia

X1 = PMDN sektor pertanian Indonesia

X2 = PMA sektor pertanian Indonesia

X3 = Jumlah tenaga kerja

Dm = Dummy variabel (kebijakan otonomi daerah)